PENGARUH VALUE FOR MONEY (EKONOMIS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS) TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)

Skripsi



Nama: Julius Saputra NIM: 222011192

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2015

PENGARUH VALUE FOR MONEY (EKONOMIS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS) TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)

Skripsi

Diajukan Untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang



Nama: Julius Saputra NIM: 222011192

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julius Saputra

Nim : 222011192

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, **9** April 2015 Penulis,

Julius Saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

: Pengaruh Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan

Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi

Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota

Palembang)

Nama Nim

: Julius Saputra

Program Studi

: 222011192 : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disyahkan Pada Tanggal, 9 April 2015

Pembimbing,

Lis Djuniar, S.E., M.Si

NIDN/NBM: 0220067101/115716

Mengetahui,

Dekan

u.b. Program Studi Akuntansi

S.E., Ak., M.Si

VIDN/NBM 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Di kau anakku, jika kau sedang marah dan emosimu memuncak cobalah untuk menahannya jangan sampai menyakiti orang yang membuatmu marah dan jangan sampai amarahmu dan emosimu menyakiti orang lain juga "ingat Nak".

(Pesan Alm. Bapakku Arisman)

Semua orang butuh waktu. Untuk menjadi sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan, ketika kehilangan sesuatu. Waktu memang bukan batu. Waktu adalah Sang Penentu.

(Julius Saputra)

Terucap Syukur Kupersembahkan kepada:

- > Allah SWT
- > Baginda Nabi Muhammad SAW
- > 9buku Kuswati dan Alm. Bapakku Arisman
- > Ayukku Listiawati, Puspita Sari dan Kakakku Heru Suratno
- Pembimbing Skripsiku Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si
- Sahabatku J.E.R.A
- > Teman-teman Seperjuanganku
- > Almamater yang Telah Mendidik dan Mendewasakanku



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur senantiasa terucap atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmatnya. Terutama nikmat islam, iman, kesehatan serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Pengaruh Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

Organisasi sektor publik sekarang ini sering dinilai sebagai pemborosan dana, sumber kebocoran dana dan organisasi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* bagi pemerintah atau organisasi sektor publik merupakan suatu keharusan sebagai wujud tanggung jawab kepada publik yang dapat mewujudkan akuntabilitas publik, wujud akuntabilitas publik dapat terlihat dari berbagai pengelolaan rencana anggaran pemerintah. Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena setiap kegiatan pemerintah dan pembangunan harus tetap selaras dengan kebijakan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Badan atau organisasi sektor publik di Kota Palembang adalah melakukan pengelola anggaran pendapatan, pengeluaran sehari-hari berupa: pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi bab berturut-turut yang pertama bab pendahuluan, kedua bab kajian pustaka, ketiga bab metode penelitian, keempat bab hasil penelitian dan pembahasan serta yang kelima bab simpulan dan saran.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan oleh semua pihak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua kandungku yang tercinta Ibuku Kuswati dan Almarhum Bapakku Arisman, Ayukku Listiawati, Puspitasari dan Kakakku Heru Suratno serta seluruh keluarga besar yang senantiasa selalu dan tidak henti-hentinya memberikan do'a, memberikan inspirasi, motivasi, material selama menjalankan kuliah dan dukungan agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si selaku pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini yang sabar membimbing, memberikan nasehat dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penyusunan skripsi ini kepada:

- Bapak DR. H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bapak Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si selaku Pembimbing Skripsi, terima kasih atas seluruh pemikiran, tenaga, waktu, masukan, dan kritik kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.
- Pak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA yang selalu menuangkan ide dan memberikan motivasi untuk menjadi yang lebih baik.
- 7. Pimpinan dan Bapak/Ibu Dosen beserta staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu guna mencerdaskan anak didiknya sehingga terbentuknya mahasiswa yang unggul dan islami.
- Kepada Ibuku Kuswati (Surga Ditelapak Kaki Ibu) dan Almarhum Bapakku Arisman.
- Kepada saudara-saudaraku (Ayukku Listiawati, Puspitasari dan Kakakku Heru Suratno).

- 10. Kepada Kakak Iparku (Sapariadi dan Herik Hendrizen)
- Kepada Keponakanku (Aufa Rifqah Khalisya, Farrel Tristan Dzakwan dan Khaira Nadifa).
- Sahabat Terbaikku J.E.R.A (Ervi Susanti, Rani Susanti, dan Adreansyah)
 Takkan Terlupakan.
- 13. Teman-teman seperjuanganku (Mbak Yobi, Raras, Mbak Karyanti, Iyal, Putra Poltak, Trian, Rahman, Anggun, Andhika, Ida, Lili, Mariska, dan teman-teman CA.11.2 yang tidak dapat disebutkan satu persatu).
- 14. Teman-teman program studi Akuntansi dan Manajemen angkatan 2011 Fakultan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 15. Teman-temanku Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya Angkatan Ke VII di Desa Pelajau Ulu Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin (Rani Sugiarti sekretaris, Analia Bendahara, Megawati, Rozalina, Ayu Nurindah Sari, Aditya Sumawa, Yoga Ade Saputra, Brando Simanjuntak, Suhendang Pitriyanti, dan Yenti Agustin, S.Ked).
- 16. Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan jajarannya, beserta seluruh masyarakat Desa Pelajau Ulu Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin yang telah bersabar membimbing kami pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) berjalan.
- 17. Kepada seluruh Serikat Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang yang telah mengizinkan melakukan penelitian.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, **9** April 2015 Penulis,

Julius Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman	1
HALAM	AN JUDULi	
HALAM	AN BEBAS PLAGIAT iii	
HALAM	AN PENGESAHAN SKRIPSI iv	
HALAM	AN MOTTO DAN PERSEMBAHANv	
HALAM	AN PRAKATAvi	
HALAM	AN DAFTAR ISI xi	
HALAM	AN DAFTAR TABEL xvii	
HALAM	AN DAFTAR GAMBAR xix	
HALAM	AN DAFTAR LAMPIRANxx	
HALAM	AN ABSTRAKxxi	
HALAM	AN ABSTRACTxxii	
BAB I	PENDAHULUAN1	
	A. Latar Belakang Masalah	
	B. Rumusan Masalah9	
	C. Tujuan Penelitian 10	
	D. Manfaat Penelitian	
BAB II	KAJIAN PUSTAKA 12	
	A. Penelitian Sebelumnya	
	B. Landasan Teori	
	1 Value For Money 16	

	a.	Pengertian Value For Money	16
	b.	Konsep Value For Money	17
	c.	Manfaat Value For Money	18
	d.	Pengukuran Value For Money	19
		1) Ekonomis	20
		2) Efisiensi	21
		3) Efektivitas	23
	e.	Langkah-langkah Pengukuran Value For Money	24
		1) Ekonomis	24
		2) Efisiensi	24
		3) Efektivitas	25
2.	A	kuntabilitas Publik	26
	a.	Pengertian Akuntabilitas Publik	26
	b.	Jenis-jenis Akuntabilitas Publik	27
		1) Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)	27
		2) Akuntabilitas Horizoontal (Horizontal Accontability).	27
	c.	Dimensi Akuntabilitas Publik	28
		1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum	
		(Accountability for Probity and Legality)	29
		2) Akuntabilitas Proses (Process Accountability)	29
		3) Akuntabilitas Program (Program Accountability)	29
		4) Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)	30

	3. Hubungan <i>Value For Money</i> dengan Akuntabilitas	
	Publik	30
	C. Hipotesis	32
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Jenis Penelitian	33
	B. Lokasi Penelitian	34
	C. Operasionalisasi Variabel	34
	D. Populasi dan Sampel	36
	1. Populasi	36
	2. Sampel	36
	E. Data yang Diperlukan	40
	F. Teknik Pengumpulan Data	41
	G. Analisis Data dan Teknik Analisis	42
	1. Analisis Data	42
	2. Teknis Analisis	45
	a) Uji Validitas	45
	b) Uji Reliabilitas	45
	c) Uji Asumsi Klasik	. 46
	1) Uji Normalitas	. 46
	2) Uji Multikolinieritas	. 46
	3) Uji Heteroskedastisitas	. 47
	d) Regresi Linier Ganda	. 47
	a) Hii Hipotosis	48

	1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	48
	2) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	50
	f) Koefisien Determinasi	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	A. Hasil Penelitian	52
	Profil Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang	52
	a. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan	
	Perempuan (BKB-PP) Kota Palembang	52
	b. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam	
	Kebakaran (BPB-PK) Kota Palembang	53
	c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan	
	Diklat) Kota Palembang	54
	d. Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota	
	Palembang	54
	e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	
	(BKPMD) Kota Palembang	55
	f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan	
	KESBANGPOL) Kota Palembang	56
	g. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang	57
	h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	
	(BPMK) Kota Palembang	58
	i. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	
	(BARPUSDOK) Kota Palembang	59

	2.	Struktur Organisasi	60
	3.	Tugas, Pokok dan Fungsi	61
В.	Pe	embahasan	64
	1.	Gambaran Karakteristik Responden	67
		a. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan	
		Pendidikan Terakhir	67
	2.	Rekapitulasi Jawaban Responden	67
		a. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel	
		Ekonomis (X ₁)	67
		b. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel	
		Efisiensi (X ₂)	70
		c. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel	
		Efektivitas (X ₃)	72
		d. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas	
		Publik (Y)	75
	3.	Hasil Pengujian Data	80
		a. Uji Validitas	80
		1) Uji Validitas Variabel Ekonomis (X ₁)	81
		2) Uji Validitas Variabel Efisiensi (X ₂)	81
		3) Uji Validitas Variabel Efektivitas (X ₃)	82
		4) Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik (Y)	83
		b. Uji Reliabilitas	83
		a Hii Asumsi Klasik	84

		1) Uji Normalitas
		2) Uji Multikolonieritas
		3) Uji Heteroskedastisitas
		d. Regresi Linier Berganda
		e. Uji Hipotesis
		1) Pengujian Hipotesisi Secara Parsial (Uji t)
		2) Pengujian Hipotesisi Secara Simultan (Uji F) 96
		f. Koefisien Determinasi
	4	. Analisis Pengaruh Value For Money (Ekonomis, Efisiensi
		dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi
		Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang) 99
BAB V	SIN	IPULAN DAN SARAN 10
	A.	Simpulan
	B.	Saran 10
DAFTAF	R PU	STAKA
LAMPIR	RAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Pengukuran Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan
	Efektivitas) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
	Kota Palembang tahun 2011, 2012 dan 2013 5
Tabel I.2	Pengukuran Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan
	Efektivitas) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam
	Kebakaran Kota Palembang tahun 2011, 2012 dan 2013 7
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya
Tabel II.2	Kriteria Ekonomis
Tabel II.3	Kriteria Efisiensi
Tabel II.4	Kriteria Efektivitas
Tabel III.1	Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang
Tabel III.2	Operasionalisasi Variabel
Tabel III.3	Jumlah Pegawai yang Terdapat Pada Struktural Organisasi
	Setiap Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang
Tabel III.4	Penentuan Sampel
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 67
Tabel IV.2	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kualitas 68
Tabel IV.3	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kuantitas 69
Tabel IV.4	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Input (Masukan) 70
Tabel IV.5	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Output (Keluaran) 71

Tabel IV.6	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kebijakan72
Tabel IV.7	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Prosedur
Tabel IV.8	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas
	Kejujuran dan Hukum
Tabel IV.9	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas
	Proses
Tabel IV.10	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas
	Program
Tabel IV.11	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas
	Kebijakan 79
Tabel IV.12	Hasil Output SPSS Uji Validitas Variabel Ekonomis (X ₁) 81
Tabel IV.13	Hasil Output SPSS Uji Validitas Variabel Efisiensi (X ₂) 82
Tabel IV.14	Hasil Output SPSS Uji Validitas Variabel Efektivitas (X ₃) 82
Tabel IV.15	Hasil Output SPSS Uji Validitas Variabel Akuntabilitas
	Publik (Y)
Tabel IV.16	Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas
Tabel IV.17	Hasil Output SPSS Uji Multikolonieritas (Tolerance-VIF) 86
Tabel IV.18	Hasil Output SPSS Uji Regresi Linier Berganda
Tabel IV.19	Hasil Output SPSS Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 92
Tabel IV.20	Hasil Output SPSS Pengujian Hipotesis Secara Simultan Uji F)96
Tabel IV 21	Hasil Output SPSS Koefisien Determinasi 98

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar II.1	Konsep Value For Money	17
Gambar II.2	Pengukuran Value For Money	20
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Badan Pemerintah Dareah Kota	
	Palembang	60
Gambar IV.2	Hasil Output SPSS Uji Normalitas (Normal P-P plot)	85
Gambar IV.3	Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)	88

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 2. Lampiran 2 Keterangan Persetujuan Pembagian Kuesioner Penelitian 3. Lampiran 3 Hasil Jawaban Responden Data Ordinal Lampiran 4 4. Hasil Pegujian SPSS version 20. 5. Lampiran 5 Tabel Pengujian (Uji r, Uji t dan Uji F) 6. Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian dan Pengambilan Data 7. Lampiran 7 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi Lampiran 8 8. Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi 9. Lampiran 9 Sertifikat Membaca dan Hapalan Al-Qur'an 10. Lampiran 10 Sertifikat Toefl 11. Lampiran 11 Sertifikat Komputer 12. Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN) 13. Lampiran 13 Sertifikat Praktek Kerja (Magang) 14. Lampiran 14 Sertifikat Seminar Kiat Sukses Lulus 3,5 Tahun 15. Lampiran 15 Sertifikat Seminar PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan

16. Lampiran 16 Biodata Penulis

ABSTRAK

Julius Saputra. 222011192. Pengaruh Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang) / Akuntansi Sektor Publik.

Perumusan masalah dalam penelitian ini; (1) bagaimanakah pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik secara parsial (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)?, (2) bagaimanakah pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik secara simultan (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)?. Tujuan; (1) untuk mengetahui pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik secara parsial (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang), (2) untuk mengetahui pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik secara simultan (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif untuk mengetahui pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Populasi yang digunakan pegawai Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus (Statistical Product and Service Solution/SPSS Version 20).

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan; (1) secara parsial value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil ini dibuktikan karena nilai $t_{\rm hitung} >$ nilai $t_{\rm tabel}$ dan nilai $t_{\rm sig} < 0.05$, (2) secara simultan value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil ini dibuktikan karena nilai $F_{\rm hitung} > F_{\rm tabel}$ dan nilai $F_{\rm sig} < 0.05$, dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R square) menunjukkan besarnya pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang) diperoleh sebesar 66,5% dan sisanya sebesar 33,5% (100% - 66,5%) dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) dan Akuntabilitas Publik.

ABSTRACT

Julius Saputra. 222011192. The Influence of Value for Money (Economic, Efficiency and Effectiveness) on Public Accountability (the Case Study of Local Government Agency of Palembang) / Public Sector Accounting.

Formulation of the problem; (1) how is the influence of value for money (economic, efficiency and effectiveness) on public accountability partially (the Case Study of Local Government Agency of Palembang)?, (2) how is the influence of value for money (economic, efficiency and effectiveness) on public accountability simultaneously (the Case Study of Local Government Agency of Palembang)?. The study aimed for finding out; (1) the influence of value for money (economic, efficiency and effectiveness) on public accountability partially (the Case Study of Local Government Agency of Palembang), (2) the influence of value for money (economic, efficiency and effectiveness) on public accountability simultaneously (the Case Study of Local Government Agency of Palembang).

The study was conducted by using associative fir finding out the influence of value for money (economic, efficiency and effectiveness) on public accountability (the Case Study of Local Government Agency of Palembang). The population of the study was employee of Local Government Agency of Palembang by using primary ang secondary data. The data was collected by using questionnaire and documentation. The data was analyzed by using quantitative statistic (Statistical Product and Service Solutions/SPSS Version 20).

The result showed; (1) value for money (economic, efficiency and effectivennes) influenced on publik accountability partially (the Case Study of Local Government Agency of Palembang) because $t_{obtained} > t_{table}$ and $t_{sig} < 0.05$, (2) value for money (economic, efficiency and effectivennes) influenced on publik accountability simultaneously (the Case Study of Local Government Agency of Palembang) because $F_{obtained} > F_{table}$ and $F_{sig} < 0.05$, value of regression coefficient was positive, it meant that there was positive influence. Based on coefficient of determination (R square) was 66.5% the rest 33.5% (100%-66.5%) was influencenced by other factor. The coclusion of the study was value for money (economic, efficiency and effectivennes) significantly influenced on publik accountability (the Case Study of Local Government Agency of Palembang).

Keywords: Value For Money (Economic, Efficiency and Effectiveness) and Public Accountability.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik sekarang ini sering dinilai sebagai pemborosan dana, sumber kebocoran dana dan organisasi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan konsep value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2009: 4).

Ekonomis berkaitan dengan pemeliharaan dan penggunaan sumber daya dalam kuantitas dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input* value yang dinyatakan dalam satuan moneter, serta ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut harus dapat menghasilkan output yang maksimal dan berdaya guna. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target – target yang bertujuan untuk kepentingan publik. Efektivitas adalah

hubungan *output* dengan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep value for money ini digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh manfaat maksimum dari barang dan jasa yang dibutuhkan dan digunakan dari sumber daya yang tersedia. Beberapa elemen mungkin bersifat subjektif sulit untuk diukur dan disalah artikan karena itu dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah value for money telah dicapai dengan baik atau belum.

Value for money tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memasukkan gabungan dari unsur kualitas, biaya, sumber daya yang digunakan, ketetapan penggunaan, batasan waktu dan kemudahan dalam menilai apakah secara bersama keseluruhan unsur telah dilakukan dengan baik. Value for money bagi pemerintah atau organisasi sektor publik merupakan suatu keharusan sebagai wujud tanggung jawab kepada publik yang dapat mewujudkan akuntabilitas publik, wujud akuntabilitas publik dapat terlihat dari berbagai pengelolaan rencana anggaran pemerintah.

Pemerintah sebagai penerima wewenang dalam mengelola dana publik dalam bentuk penyediaan pelayanan jasa dan pengelolaan sumber daya. Berbagai aktivitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya tidak bisa lepas dari peran publik yang memberikan dukungan dana. Alasan mengapa publik menuntut pertanggungjawaban kinerja pemerintah dalam

penyediaan pelayanan jasa dan pengelolaan sumber daya, karena publik merupakan penyangga utama berjalannya roda kepemerintahan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Haryanto, dkk 2007: 12). Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu:

- Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya: pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009: 21).

Penelitian yang sejenis pernah dilakukan oleh Sri (2009), tentang pengaruh value for money terhadap kualitas pelayanan publik dan hasil dari penelitian didapat sebesar 78,85%, artinya value for money memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik, apabila value for money dapat diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dapat terwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri. Begitu sebaliknya apabila value for money tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik tidak akan maksimal. Sisanya sebesar 21,15%

(100% - 78,85%) dipengaruhi oleh faktor – faktor lain, seperti: sumber daya manusia yang dimiliki oleh Puskesmas Pasirkaliki belum dapat menerapkan sepenuhnya *value for money* dan masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas yang disediakan.

Taufik (2013), meneliti tentang evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis *value for money* pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil dari pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda statistik *non* parametrik, yaitu: *wilcoxon signed rank test* menunjukkan bahwa adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomi dan efisien. Tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio efektif.

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan anggaran saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik oleh Badan atau organisasi tersebut. Badan Pemerintah Daerah di Kota Palembang, yaitu: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Badan Pembangunan Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Badan Arsip, Perpusatakaan dan Dokumentasi.

Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setiap kegiatan pemerintah dan pembangunan harus tetap selaras dengan kebijakan. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan atau organisasi sektor publik di Kota Palembang adalah melakukan pengelola anggaran pendapatan, pengeluaran sehari-hari, berupa: pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang dengan melakukan pengukuran *value for money* yang dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut:

Tabel I.1
Pengukuran Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas)
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota
Palembang Tahun 2011, 2012 dan 2013

Value For Money	Tahun		
Value For Money	2011	2012	2013
Ekonomis	90,35%	73,52%	84,12%
Efisiensi	65,85%	27,34%	28,29%
Efektivitas	105,37%	95,35%	91,99%

Sumber: Penulis, 2015

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat diketahui bahwa rasio ekonomis pada tahun 2011 sampai 2013 dalam pemeliharaan dan penggunaan sumber daya dalam kuantitas dan kualitas tertentu mengalami fluktuasi. Tahun 2011 tingkat pencapaian 90,35% dikatakan kurang ekonomis, pada tahun 2012 tingkat pencapaian 73,52% dikatakan ekonomis dan pada tahun 2013 tingkat pencapaian 84,12% dikatakan cukup ekonomis, sedangkan apabila Badan

atau organisasi dikatakan sangat ekonomis itu tingkat presentase pencapaian di bawah 60%. Jadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang dikatakan cukup ekonomis karena tidak dapat meminimalisir input resources yang digunakan sehingga pengeluaran tidak produktif atau boros.

Rasio efisiensi pada tahun 2011 sampai 2013 dalam penggunaan dana masyarakat harus menghasilkan *output* yang maksimal. Tahun 2011 tingkat pencapaian 65,85% dikatakan efisien, pada tahun 2012 tingkat pencapaian 27,34% dikatakan sangat efisien dan pada tahun 2013 tingkat pencapaian 28,29% dikatakan sangat efisien.

Rasio efektivitas pada tahun 2011 sampai 2013 bahwa anggaran harus mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2011 tingkat pencapaian 105,37% itu dikatakan sangat efektif, pada tahun 2012 tingkat pencapaian 95,35% dikatakan efektif dan pada tahun 2013 tingkat pencapaian 91,99% dikatakan efektif. Jadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang dikatakan tidak efektif dalam pencapaian target dan tujuan untuk kepentingan publik yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya tidak tercapai bahkan selalu mengalami penurunan.

Selanjutnya survey pendahuluan dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang dengan melakukan pengukuran *value for money* yang dapat dilihat pada tabel I.2 sebagai berikut:

Tabel I.2
Pengukuran Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas)
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
Kota Palembang Tahun 2011, 2012 dan 2013

Value For Money	Tahun		
value For Money	2011	2012	2013
Ekonomis	87,14%	89,12%	90,19%
Efisiensi	306,96%	397,33%	432,23%
Efektivitas	86,04%	119,60%	101,40%

Sumber: Penulis, 2015

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa rasio ekonomis pada tahun 2011 sampai 2013 dalam pemeliharaan dan penggunaan sumber daya dalam kuantitas dan kualitas tertentu mengalami kenaikan terus menerus setiap tahunnya. Tahun 2011 dan 2012 tingkat pencapaian 87,14% dan 89,12% dikatakan cukup ekonomis, serta pada tahun 2013 tingkat pencapaian 90,19% dikatakan kurang ekonomis, sedangkan apabila Badan atau organisasi dikatakan sangat ekonomis itu tingkat presentase dalam pencapaian di bawah 60%. Jadi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang dikatakan kurang ekonomis karena tidak dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan sehingga pengeluaran tidak produktif atau boros

Rasio efisiensi pada tahun 2011 sampai 2013 dalam penggunaan dana masyarakat harus menghasilkan *output* yang maksimal. Tahun 2011 sampai 2013 tingkat pencapaian lebih dari 100% dikatakan tidak efisien. Jadi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang

dikatakan sangat efisien dalam penggunaan dana untuk menghasilkan *output* yang maksimal.

Rasio efektivitas pada tahun 2011 sampai 2013 bahwa anggaran harus mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2011 tingkat pencapaian 86,04% itu dikatakan cukup efektif, pada tahun 2012 tingkat pencapaian 119,60% dikatakan sangat efektif dan pada tahun 2013 walaupun tingkat pencapaian menurun 101,40% tetapi masih dikatakan sangat efektif. Jadi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah Kota Palembang dikatakan sangat efektif dalam pencapaian target dan tujuan untuk kepentingan publik yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya tercapai.

Fenomena yang terjadi sehubungan dengan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan anggaran dan tahap pelaksanaan anggaran publik tidak mendapat akses (akuntabilitas rendah). Dilihat pada rasio ekonomis dari tahun 2011 ke 2012 meningkat dan pada tahun 2013 mengalami fluktuasi disini Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang dan Badan Pemadam Kebakaran dalam hal Bencana dan Penanggulangan pertanggungjawaban yang berkaitan pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan tidak sesuai akibatnya dalam pemeliharaan dan penggunaan sumber daya dalam kuantitas dan kualitas tidak optimal dan boros atau tidak hemat.

Dilihat dari rasio efisiensi bahwa dari tahun 2011 sampai 2013 lebih dari 100% dikatakan tidak efisien disini Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang dilihat dari tingkat pencapaian pertanggungjawaban proses yang terkait dengan prosedur dalam melaksanakan tugas belum adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan akuntabilitas (tanggung jawab) yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Dilihat juga pada rasio efektivitas setiap tahunnya menurun yang terjadi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang, dari penurunan tersebut pertanggungjawaban dalam pembuatan suatu kebijakan tidak mempertimbangkan tujuan dan kebijakan yang diambil dan sasarannya.

Berdasarkan uraian latar belakang mengingat pentingnya akuntabilitas publik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Value For Money* (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah

- 1. Bagaimanakah pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik secara parsial (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)?
- 2. Bagaimanakah pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik secara simultan (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik secara parsial (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).
- Untuk mengetahui pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik secara simultan (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik, mengetahui pengaruh *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik dan mengetahui bahwa pertanggungjawaban itu sangat penting dalam menjalankan semua kegiatan.

2. Bagi Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam pelaksanaan program atau kegiatan dan penggunaan sumber daya harus dilakukan secara *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) agar dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik.

Karena apabila *value for money* dapat diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dan pertanggungjawaban dapat terwujud seiring dengan perkembangan *value for money* itu sendiri. Begitu sebaliknya apabila *value for money* tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dan pertanggungjawaban tidak akan maksimal.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa jurusan akuntansi sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang dengan menambah variabel yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian pertama berjudul analisis penerapan value for money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilakukan oleh (Tri, 2007). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja financial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan konsep value for money cukup ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu: data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode tahun 2002 sampai 2004. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif, serta melakukan pengujian hipotesis.

Hasil dari penelitian ini adalah jika dilihat berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2002 sampai 2004 cukup ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Dilihat berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan konsep

value for money, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup ekonomis dan efisiensi tetapi tidak efektivitas.

Penelitian kedua berjudul pengaruh *value for money* terhadap kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dilakukan oleh (Sri, 2009). Tujuan penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui pelaksanaan value for money pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh value for money terhadap kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) sebagai variabel independen dan kualitas pelayanan publik sebagai variabel dependen.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi, pengujian koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah *value for money* yang dilaksanakan pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung sangat baik dan kualitas pelayanan sangat berkualitas.

Penelitian ketiga berjudul evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis *value for money* pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dilakukan oleh (Taufik, 2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan menggunakan penilaian kinerja berdasarkan konsep *value for money*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data dalam bentuk ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 2004 sampai 2006 dan tahun 2008 sampai 2010. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan analisis kuntitatif, pengumpulan data populasi dan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, serta melakukan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda statistik *non* parametrik, yaitu: *wilcoxon signed rank test* menunjukkan bahwa adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomis, rasio efisiensi dan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio efektivitas.

Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Penerapan Value For Money pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), (Tri, 2007).	- Sama-sama membahas tentang value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).	- Terletak pada objek penelitian, penelitian Tri dilakukan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang. - Terletak pada operasionalisasi variabel.
2.	Pengaruh Value For Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung, (Sri, 2009).	- Sama-sama membahas tentang value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).	- Terletak pada objek penelitian, penelitian Sri dilakukan di Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang. - Terletak pada operasionalisasi variabel.
3.	Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur, (Taufik, 2013).	- Sama-sama membahas tentang value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).	- Terletak pada objek penelitian, penelitian Taufik dilakukan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang. - Terletak pada operasionalisasi variabel.

Sumber: Penulis, 2015

B. Landasan Teori

1. Value For Money

a. Pengertian Value For Money

Mahsun (2006: 132), *value for money* adalah pengukuran kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Indra (2006: 280), *value for money* merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja organisasi sektor publik. Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip utama dalam menyelenggarakan anggaran belanja agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan kesejahteraan yang maksimal.

Mardiasmo (2009: 127), value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama.

Secara umum value for money adalah penerapan ketiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu: ekonomis berkaitan dengan pemilihan sumber daya dalam kuantitas dan kualitas tertentu pada harga yang paling rendah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal dan berdaya guna. Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik.

b. Konsep Value For Money

Haryanto, dkk (2007: 6), value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, vaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Mardiasmo (2009: 130), elemen pokok yang mendasari pelaksanaan menajemen publik, meliputi: ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencangkup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) tercapainya tujuan dan sasaran.

Secara sistematis value for money dapat digambarkan sebagai berikut:

Konsep Value For Money Efisiensi Efektivitas Ekonomis Nilai Input Input Output Outcome

Gambar II.1

Sumber: Mardiasmo (2009: 5)

Mardiasmo (2009: 5), adapun definisi input, output dan outcome adalah

1) Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas.

- Output merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program dan aktivitas.
- 3) Sasaran antara (Throuhput) merupakan analisis value for money memerlukan data input dan data output yang memadai karena value for money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran input dan output.
- Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

c. Manfaat Value For Money

Halim, dalam Mahsun (2006: 186), konsep value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat, yaitu:

- Meningkatnya efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatnya mutu pelayanan publik.
- Menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- 4) Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik.
- Meningkatnya kesadaran akan uang publik (public cost anwareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Haryanto, dkk (2007: 6-7), manfaat implementasi konsep *value* for money pada organisasi sektor publik adalah

- Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- Menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
- 4) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost anwareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

d. Pengukuran Value For Money

Mardiasmo (2009: 132), ketiga pokok dalam bahasan value for money sangat berkaitan satu dengan yang lainya. Ekonomis mengenai masukan, efisiensi membahas mengenai masukan dan keluaran serta efektivitas membahas mengenai keluaran dan dampak. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengukuran Value For Money

Input Value Proses Output Outcome Tujuan

Ekonomis (Hemat) Efisiensi (Berdaya guna) Efektivitas (Berhasil guna)

Cost-Effectiveness

Gambar II.2 Pengukuran *Value For Money*

Sumber: Mardiasmo (2009: 132)

1) Ekonomis

Mahsun (2006: 181), ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input), dengan kata lain ekonomis merupakan praktik pembelian barang dan jasa pada tingkat kuantitas dan kualitas tertentu dengan harga yang terbaik.

Haryanto, dkk (2007: 6), ekonomis adalah pemerolehan *input* dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter, serta ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Mardiasmo (2009: 133), pengukuran ekonomis mempertimbangkan masukan *(input)* yang digunakan. Pertanyaan yang berhubungan dengan pengukuran ekonomis adalah

- a) Apakah biaya organisasi lebih dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- b) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya financial secara optimal?

Manfaat dari ekonomis, yaitu: dengan menghindari pengeluaran yang berlebihan pada organisasi yang dapat menimbulkan kegiatan yang tidak produktif pada organisasi, di samping itu juga organisasi dapat menilai sejauh mana organisasi dapat meminimalisir biaya yang digunakan. Secara umum ekonomis adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik tersebut.

2) Efisiensi

Indra (2006: 280), efisiensi merupakan hubungan antara *input* dan *output* dimana barang jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu.

Haryanto, dkk (2007: 6), efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan *input* yang terendah. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2009: 133-134), efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*, semakin besar *output* yang dihasilkan dibandingkan *input*, maka semakin efisien suatu organisasi.

Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
- b) Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*.
- c) Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- d) Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*.

Mardiasmo (2009: 134), dalam pengukuran kinerja *value for money*, tingkat efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Efisiensi alokasi

Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal.

b) Efisiensi teknis

Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output*.

Manfaat yang ada dalam efisiensi, yaitu: dapat menetapkan standar kerja yang tepat bagi perusahaan dalam peningkatan kinerja

yang lebih baik, di samping itu juga organisasi dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, dengan penggunaan biaya yang serendah-rendahya dan menghasilkan tingkat keluaran yang optimal. Secara umum efisiensi adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat masukan (input) yang kemudian akan dibandingkan dengan tingkat keluaran (output) organisasi sektor publik tersebut.

3) Efektivitas

Indra (2006: 280), efektivitas adalah hubungan *output* dengan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Haryanto, dkk (2007: 6), efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Efektivitas bermanfaat untuk mengetahui program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dicapai oleh perusahaan dan apa saja yang telah berhasil dilakukan oleh perusahaan dalam target yang telah ditetapkan. Secara umum efektivitas adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat keluaran (output) dari organisasi sektor publik dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

e. Langkah-langkah Pengukuran Value For Money

Mahsun (2006: 186), langkah-langkah pengukuran value for money adalah

1) Ekonomis

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran.

Ekonomis =
$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Tabel II.2 Kriteria Ekonomis

Presentase Pengukuran	Kriteria
100% Keatas	Tidak Ekonomis
90% sampai 100%	Kurang Ekonomis
80% sampai 90%	Cukup Ekonomis
60% sampai 80%	Ekonomis
Kurang dari 60%	Sangat Ekonomis

Sumber: Kepmendagri Tahun 2006 No. 690,900.327, 2015

2) Efisiensi

Mengukur perbandingan tingkat *output* dengan tingkat *input* dari organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan.

Efisiensi =

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan Realisasi Pendapatan x 100%

Tabel II.3 Kriteria Efisiensi

Presentase Pengukuran	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Tahun 2006 No. 690,900,327, 2015

3) Efektivitas

Mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel II.4 Kriteria Efektivitas

Presentase Pengukuran	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektivitas
90% sampai 100%	Efektivitas
80% sampai 90%	Cukup Efektivitas
60% sampai 80%	Kurang Efektivitas
Kurang dari 60%	Tidak Efektivitas

Sumber: Kepmendagri Tahun 2006 No. 690.900.327, 2015

2. Akuntabilitas Publik

a. Pengertian Akuntabilitas Publik

Haryanto, dkk (2007: 12), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2009: 20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Muindro (2010: 14), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Mahmudi (2010: 23), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah (agent) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal).

Mahsun (2013: 169), akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab? dan untuk apa organisasi (pekerja individu) itu bertanggungjawab?

Secara umum akuntabilitas publik berarti pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi antara pemerintah dengan masyarakat.

b. Jenis-jenis Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2009: 21), akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya: pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Konteks organisasi

pemerintahan akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu: hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan.

c. Dimensi Akuntabilitas Publik

Haryanto, dkk (2007: 13), akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan.

Harun (2009: 64), bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah ada empat pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan.

Ellwod, dalam Mardiasmo (2009: 21), akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

 Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for Probity and Legality).

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas Proses (Process Accountability)

Akuntabilitas proses (process accountability) terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses manifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya.

3) Akuntabilitas Program (Program Accountability)

Akuntabilitas program (program accountability) berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya program yang bermutu yang mendukung strategi, pencapaian visi dan misi organisasi sektor publik.

4) Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

Pembuatan suatu kebijakan harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil dan siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat serta dampaknya atas kebijakan tersebut.

3. Hubungan Value For Money dan Akuntabilitas Publik

Indra (2006: 74), asumsi UU No. 17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai notasis yang dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti: ekonomis, efisiensi dan efektivitas harus dapat direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mardiasmo (2009: 121), bahwa akuntabilitas publik bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi,

meliputi: kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money).

Mardiasmo (2009: 20-21), semakin pesatnya perkembangan dalam dunia usaha, menyebabkan persaingan semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya akuntabilitas publik pada perusahaan publik dan semakin rumitnya masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi publik dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan. Untuk mencapai akuntabilitas publik yang baik harus digunakannya pengukuran kinerja ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money).

Mahsun (2013: 169), menyatakan bahwa manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik salah satunya untuk meningkatkan kesadaran akan uang publik *(public cost anwareness)* sabagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Secara umum hubungan *value for money* dan akuntabilitas publik merupakan salah satu unsur pokok perwujudan pemerintah yang baik yang saat ini sedang diupayakan. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money*).

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dibahas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara Parsial

- H_1 = Ekonomis berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).
- H₂ = Efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada
 Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).
- H₃ = Efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

2. Secara Simultan

H₄ = Value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2012: 53-55), jenis penelitian jika dilihat dari tingkat eksplanasinya terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dari satu variabel.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu: penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel independen *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap variabel dependen akuntabilitas publik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dapat dilihat pada tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel III.1 Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang

Nama Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang	Alamat Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang	Jl. Merdeka No. 03 Palembang 30132 Telp: (0711) 358272
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang	Jl. Merdeka No. 08 Palembang Telp: (0711) 312011-113
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang	Jl. Merdeka No. 252 Palembang 30131 Telp: (0711) 357279
Badan Pembangunan Daerah Kota Palembang	Jl. Merdeka No. 74 Palembang Telp: (0711) 353522, 367486
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang	Jl. Ki Kemas Umar (Jl. Merdeka) No. 84. Kel 22 Ilir Palembang 30131, Telp/Fax: (0711) 364115
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang	Jl. Lunjuk Jaya No. 03 (Demang Lebar Daun-Bukit Besar) Palembang Telp: (0711) 368726
Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Jl. Lunjuk Jaya No. 02 (Demang Lebar Daun-BB) Palembang 30151 Telp: (0711) 310154
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang	Jl. Demang Lebar Daun No. 03 (Bukit Besar) Telp: (0711) 445985
Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang	Jl. Jendral Bambang Utoyo Kel 5 Ilir (Lemabang) Palembang Telp: (0711) 7186355

Sumber: Penulis, 2015

C. Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2012: 58), operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau

menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur, kemudian ditarik kesimpulan. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.2 sebagai berikut:

Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Value For Money: 1. Ekonomis (X ₁)	Praktek pembelian barang dan jasa pada tingkat kuantitas dan kualitas tertentu dengan harga yang terbaik atau terendah	a. Kualitas b. Kuantitas
2. Efisiensi (X ₂)	Pencapaian output yang maksimum dengan input yang rendah. Efisiensi perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.	a. Input (masukan) b. Output (keluaran)
3. Efektivitas (X ₃)	Pencapaian hasil program berdasarkan sejauh mana tingkat kebijakan dan prosedur organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	a. Kebijakan b. Prosedur
Akuntabilitas Publik (Y)	Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.	a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum b. Akuntabilitas proses c. Akuntabilitas program d. Akuntabilitas kebijakan

Sumber: Penulis, 2015

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2012: 389), populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pegawai pada setiap Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel III.3 sebagai berikut:

Tabel III.3 Jumlah Pegawai yang Terdapat Pada Struktural Organisasi Setiap Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang

No	Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang	Jumlah
1.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	17 orang
2.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	17 orang
3.	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	23 orang
4.	Badan Pembangunan Daerah	17 orang
5.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	17 orang
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17 orang
7.	Badan Lingkungan Hidup	17 orang
8.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	17 orang
9.	Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	14 orang
	Total Keseluruhan	156 orang

Sumber: Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang, 2015

2. Sampel

Sugiyono (2010: 389), sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menetukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Pengambilan sampel dari suatu populasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Probability Sampling

Probability sampling merupakan metode sampling yang setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk terpilih sebagai sampel.

1) Sampel Random Sederhana (Simple Random Sampling)

Sampel random sederhana (simple random sampling) merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel.

2) Strata Sampel (Stratified Sampling)

Strata sampel (stratified sampling) merupakan teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Karena jumlah populasi pada setiap strata tidak sama, maka dalam pelaksanaannya dibagi dua jenis, yaitu:

a) Proposional

Proporsional adalah jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding dan sesuai dengan proposional ukurannya.

b) Disproposional

Disproporsional adalah jumlah sampel yang diambil dari setiap strata jumlahnya sama tidak sebanding dengan jumlah populasi dengan proporsi sampel disetiap strata.

3) Cluster Sampling

Cluster sampling merupakan populasi dibagi dulu atas kelompok berdasarkan area atau cluster, lalu kemudian beberapa cluster tidak perlu homogen.

4) Sampel Ganda (Double Sampling)

Sampel ganda (double sampling), sering disebut dengan istilah sampel berjenjang (sequential sampling), sampel multitahap (multiphase sampling).

b. Non Probability Sampling

Non probability sampling merupakan setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah strata sampel (stratified sampling) merupakan teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Syofian (2010: 149), teknik solvin bahwa untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan: n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (Error Tolerance) 10%

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2} \qquad n = \frac{156}{1 + 156(0,1)^2} \qquad n = \frac{156}{1 + 156(0,01)}$$
$$n = \frac{156}{1 + 1,56} \qquad n = \frac{156}{2,56}$$

n = 60,9 Pembulatan 61

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 61 pegawai. Pemilihan sampel menggunakan strata sampel (stratified sampling) merupakan teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Penentuan sampel dapat dilihat pada tabel III.4.

Tabel III.4 Penentuan Sampel

No	Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang	Alokasi	Sampel
1.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang	(17 ÷ 156) x 61	6,6 (7)
2.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang	$(17 \div 156) \times 61$	6,6 (7)
3.	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang	(23 ÷ 156) x 61	8,9 (9)
4.	Badan Pembangunan Daerah Kota Palembang	(17 ÷ 156) x 61	6,6 (7)
5.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang	(17 ÷ 156) x 61	6,6 (7)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang	$(17 \div 156) \times 61$	6,6 (7)
7.	Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang	$(17 \div 156) \times 61$	6,6 (7)
8.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan (17 ÷ 156) Kelurahan Kota Palembang		6,6 (7)
9.	Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang	(14 ÷ 156) x 61	5,4 (5)
	Jumlah Sampel		63

Sumber: Penulis, 2015

E. Data yang Diperlukan

Danang (2013: 21-22), ada dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya tanpa perantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan atau dari sumber lainnya yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa jawaban responden terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, kuesioner yang diberikan berisi item-item pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian, yaitu: value for money dengan tiga variabel ekonomis, efisiensi dan efektivitas sebagai variabel independen dan akuntabilitas publik sebagai variabel dependen. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuisioner.

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dapat dijadikan sumber informasi. Data sekunder berupa profil pada setiap Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang, yaitu: tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi dan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan tahun 2011 sampai 2013, anggaran pengeluaran dan realisasi

pengeluaran tahun 2011 sampai 2013 yang didapat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang sebagai survei pendahuluan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012: 194-205), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambar dan karya-karya monumental.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner dilakukan dengan memberikan daftar pernyataan sesuai dengan yang akan diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan menyalin maupun mengutip dokumen pada setiap Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga sesuai dengan penelitian.

Data yang didapat dari setiap Badan Pemerintah Daerah, yaitu: tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi dan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan tahun 2011 sampai 2013, anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran tahun 2011 sampai 2013 yang didapat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang sebagai survei pendahuluan penelitian.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2012: 13-14), analisis data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan mengunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah untuk perhitungan angka-angka dalam menganalisis data yang diperoleh.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan dengan menggunakan rumusrumus statistik yang disesuaikan dengan penelitian untuk menilai hasil dari pengisian kuesioner tersebut diuji melalui pengujian statistik yang dibantu oleh aplikasi program *Statistical Product and Service Solution*/SPSS *Version* 20.

Sugiyono (2012: 132-142), berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian, yaitu:

a. Skala Likert

Skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

b. Skala Gutman

Skala gutman adalah skala yang digunakan bila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan.

c. Rating Scale

Rating scale adalah mengolah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam penelitian kualitatif.

d. Semantic Deferential

Semantic deferential adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang.

Keempat jenis skala di atas bila digunakan dalam pengukuran akan memperoleh data interval atau rasio, hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*, skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Skala *likert*, berdasarkan indikator variabel yang diukur dan dijadikan tolak ukur untuk dilakukannya penyusunan item-item instrument berupa pernyataan.

Jawaban pada skala *likert* adalah sebagai berikut:

Sangat Setuju = SS dikuantitatifkan = 5

Setuju = S dikuantitatifkan = 4

Ragu-Ragu = RR dikuantitatifkan = 3

Tidak Setuju = TS dikuantitatifkan = 2

Sangat Tidak Setuju = STS dikuantitatifkan = 1

2. Teknis Analisis

a. Uji Validitas

Uji validitas (test of validity) dilakukan untuk mengukur pernyataan atau pertanyaan yang disusun kedalam kusioner berdasarkan indikator variabel apakah memiliki validitas atau tidak dan hasilnya akan ditunjukkan oleh suatu indek.

Danang (2013: 85), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah bukti bisa dikatakan valid, yaitu:

- Korelasi dari item-item kuesioner haruslah kuat dan peluang kesalahan tidak terlalu besar (teori maksimal 5% dengan uji pertama).
- 2) Korelasi harus memiliki nilai atau arah yang positif. Arah positif tersebut berarti $r_{hitung} > r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Danang (2013: 81), uji reabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pernyataan atau pertanyaan dikatakan realibel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Untuk menentukan pernyataan *reliable* dapat ditentukan apabila nilai r_{hitung}

Cronbach's Alpha > nilai r_{tabel} Cronbach's Alpha, semakin besar alpha (mendekati 1) maka dikatakan pertanyaan tersebut *reliable*.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Danang (2013: 92-97), uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.

Pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik *Normal P-P plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas, yaitu:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah diagonal maka model regresi tidak terdistribusi secara normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Danang (2013: 87-90), uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Model regresi dianggap bebas dari multikolinieritas jika variabel independen penelitian memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Danang (2013: 90-92), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji scatter plot (nilai prediksi variable dependen zpred dengan residual srised). Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *Scatter plot*, yaitu:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti: titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti: titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Regresi Linier Ganda

Sugiyono (2012: 277), analisis regresi linier ganda adalah hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih, variabel

independen value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas), dengan variabel dependen akuntabilitas publik. Analisis yang digunakaan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Keterangan: Y = Akuntabilitas Publik

a = Konstanta (nilai Y bila X = 0)

b₁ = Koefisien regresi ekonomis

b₂ = Koefisien regresi efisiensi

b₃ = Koefisien regresi efektivitas

 $X_1 = Ekonomis$

X₂ = Efisiensi

X₃ = Efektivitas

e. Uji Hipotesis

Sugiyono (2012: 93), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

1) Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B₁ atau B₂ yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individual, yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

- H_{o1}: Ekonomis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).
- H_{a1}: Ekonomis berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).
- H_{o2}: Efisiensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).
- H_{a2}: Efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).
- H_{o3}: Efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).
- H_{a3}: Efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-l, taraf nyata (α) berarti nilai t tabel, taraf nyata dari F_{tabel} ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k-l.

c) H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Berdasarkan probabilitas H_0 ditolak jika $P_{value} < 5\%$, H_a diterima jika $P_{value} > 5\%$.

d) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$.

2) Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B (B₁ atau B₂) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara simultan atau bersama, yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₀₄: Value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

H_{a4}: Value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-l, taraf nyata (α) berarti nilai F_{tabel} ,

taraf nyata dari F_{tabel} ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k-1.

- c) H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$. Berdasarkan probabilitas H_0 ditolak jika $P_{value} < 5\%$, H_a diterima jika $P_{value} > 5\%$.
- d) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$.

f. Koefisien Determinasi

Dwi (2012: 55), pengujian koefisien determinasi adalah untuk mengetahui besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

Kesimpulan hipotesis dilakukan berdasarkan t-test dan F-test untuk menguji signifikan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai r^2 berada diantara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 1 maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel terikat atau merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya kemampuan menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang

a. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-

PP) Kota Palembang

Guna memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang Nomor: 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Palembang dibidang BKB-PP Kota Palembang adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BKB-PP Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Penduduk tumbuh seimbang menuju Palembang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera (EMAS) 2018.

2) Misi

Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan gender melalui kelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kota Palembang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 25. Dibentuklah (BPB-PK) Kota Palembang dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 5 Tahun 2012 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja BPB-PK Kota Palembang. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BPB-PK Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya rasa aman pada masyarakat dari bencana dan bahaya kebakaran.

2) Misi

- a) Peningkatan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana BPB-PK yang memadai didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
- b) Peningkatan kualitas, kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
- c) Terselenggaranya sosialisasi BPB-PK serta target retribusi alat pemadam kebakaran.
- d) Tersedianya sarana atau prasarana penyelamatan bencana dan proteksi kebakaran, serta penyelamatan jiwa pada bangunan gedung.

c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan Diklat) Kota Palembang

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang. BKD dan Diklat Kota Palembang adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang kepegawaian daerah dan diklat berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BKD dan Diklat Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Pelayanan dan manajemen kepegawaian yang berkualitas menuju terciptanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, inovatif dan sejahtera dalam rangka mendukung terwujudnya Palembang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera (EMAS) 2018.

2) Misi

Mewujudkan sumber daya aparatur yang beriman, profesional, visioner dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN)

d. Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang. BAPPEDA Kota Palembang adalah unsur

perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BAPPEDA Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya BAPPEDA Kota Palembang yang handal, professional dan berkualitas.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota.
- b) Meningkatkan kompetensi BAPPEDA Kota Palembang sebagai lembaga perencanaan.

e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kota Palembang

Berdirinya BKPMD Kota Palembang tepatnya pada Bulan November 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah BKPMD Kota Palembang merupakan salah satu Badan yang fungsinya melayani dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan investor baik masalah tempat perizinan maupun koordinasi dengan instansi lainnya. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BKPMD Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya investor untuk berinvestasi di Kota Palembang

2) Misi

- a) Mewujudkan pelayanan prima kepada dunia usaha khususnya masyarakat umum.
- b) Meningkatkan kerjasama antar instansi maupun antar dunia usaha dan pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri.
- c) Menyiapkan dan memperbaiki perangkat hukum yang berkaitan dengan penanaman modal.
- d) Meningkatkan sosialisasi, promosi dan temu investor.
- e) Menyiapkan database yang berkenaan dengan peluang dan potensi penanaman modal.

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan KESBANGPOL) Kota Palembang

Badan KESBANGPOL Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 4 Tahun 2012 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah pada Badan KESBANGPOL Kota Palembang dan peraturan Walikota Nomor: 47 Tahun 12 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan KESBANGPOL Kota Palembang. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh Badan KESBANPOL Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan stabilitas politik dalam pembangunan melalui pembentukan masyarakat yang partisipatif, beradab dan demokratis.

2) Misi

- a) Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan.
- b) Peningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.
- c) Pengembangan sistem politik yang demokratis.
- d) Perwujudan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif.

g. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang Nomor: 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Palembang dibidang lingkungan hidup Kota Palembang adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BLH Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Pengelolaan lingkungan Kota Palembang secara terpadu menuju Kota berwawasan lingkungan.

2) Misi

- a) Meningkatkan kemampuan aparatur.
- b) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan.

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMK) Kota Palembang

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang Nomor: 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Palembang dibidang BPMK Kota Palembang adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BPMK Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan aparatur dan kelembagaan masyarakat dan kelurahan.

2) Misi

a) Meningkatkan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat.

- b) Meningkatkan manajemen lembaga dan usaha ekonomi masyarakat.
- c) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
- d) Meningkatkan peran perempuan di kelurahan Kota Palembang.

i. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi (BARPUSDOK) Kota Palembang

Berdirinya Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang 31 Desember 2003 itu masih dalam bentuk kantor dan diresmikan sebagai Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang itu tepatnya pada tanggal 28 Desember 2008. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah BARPUSDOK Kota Palembang. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BARPUSDOK Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

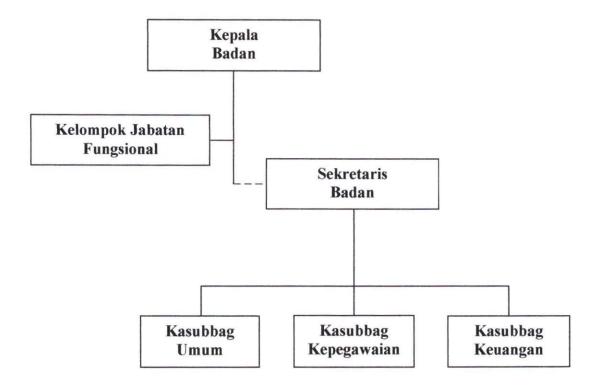
Mewujudkan lembaga arsip, perpustakaan dan dokumentasi yang profesional dalam mendukung Palembang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera (EMAS) 2018.

2) Misi

Meningkatkan sistem pengolahan dan pelayanan arsip, perpustakaan dan dokumentasi melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia.

2. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang



Sumber: Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang, 2015

3. Tugas, Pokok dan Fungsi

a. Kepala Badan

1) Tugas Pokok

Melaksanakan program dan kegiatan dibidang koordinasi penanaman modal daerah sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

2) Fungsi

- a) Memimpin kegiatan Badan dan urusan kesekretariatan serta bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
- b) Penyusunan visi, misi dan rencana strategis Badan.
- c) Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang koordinasi penanaman modal daerah.
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koordinasi penanaman modal daerah.
- e) Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan investasi baik bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- f) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
- g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretariat

1) Tugas Pokok

Melaksanakan urusan administrasi yang meliputi: pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtangaan.

2) Fungsi

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
- c) Pengelolaan urusan keuangan.
- d) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- e) Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Bagian Umum

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan serta rumah tangga.

2) Fungsi

- a) Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan sub bagian umum.
- b) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum.

- c) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan Badan.
- d) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan serta perlengkapan Badan.
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.

2) Fungsi

- a) Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan sub bagian kepegawaian.
- b) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian Badan.
- c) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan Badan.
- d) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan kearsipan, kepegawaian dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Badan.
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

e. Sub Bagian Keuangan

1) Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan anggaran tahunan Badan, pengelolaan dan pengendalian keuangan, pembukuan dan administrasi perbendaharaan.

2) Fungsi

- a) Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan bagian keuangan.
- b) Pengelolaan urusan administrasi keuangan.
- c) Penyusunan rencana anggaran pembiayaan.
- d) Penyelenggaraan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan akuntansi.
- e) Penyiapan dan penghimpunan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai hasil pemeriksaan verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan.
- f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Pembahasan

Analisis Pengaruh Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), karena setiap kegiatan pemerintah dan pembangunan harus tetap selaras dengan kebijakan. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan atau organisasi sektor publik di Kota Palembang adalah melakukan pengelula anggaran pendapatan, pengeluaran sehari-hari berupa: pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Pengelolaan anggaran pada organisasi sektor publik harus memperhatikan konsep *value for mon*ey dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* bagi pemerintah atau organisasi sektor publik merupakan suatu keharusan sebagai wujud tanggung jawab kepada publik yang dapat mewujudkan akuntabilitas publik, wujud akuntabilitas publik dapat terlihat dari berbagai pengelolaan rencana anggaran pemerintah.

Berdasarkan penelelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh value for money terhadap kualitas pelayanan publik yaitu pengaruh value for money terhadap kualitas pelayanan publik dan hasil dari penelitian didapat sebesar 78,85 %. Artinya value for money memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik, apabila value for money dapat diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dapat terwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan sekarang walaupaun memiliki perbedaan pada penelitian sebelumnya yang terdapat pada variabel dependennya tetapi pembahasan mengenai *value for money* sama jadi peneliti ini ingin mengetahui secara parsial dan secara simultan apakah *value for money*

(ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebanyak 63 tetapi kuesioner yang tidak dikembalikan sebanyak 16 sehingga jumlah kuesioner yang menjadi sumber data untuk diolah adalah 47, dan dalam melakukan pengolahan data dibantu oleh (Statistical Product and Service Solution/SPSS Version 20). Langkah-langkah dilakukan dengan teknis analisis sebagai berikut:

- 1. Uji Validitas
- 2. Uji Reliabilitas
- 3. Uji Asumsi Klasik:
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Multikolonieritas
 - c. Uji Heteroskedastisitas
- 4. Regresi Linier Ganda
- 5. Uji Hipotesis
 - a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
 - b. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

6. Koefisien Determinasi

Berikut ini penjelasan mengenai deskripsi responden dan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengolahan data yang dibantu oleh (Statistical Product and Service Solution/SPSS Version 20).

1. Gambaran Karakteristik Responden

a. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	0	0,00%
2.	Diploma	1	2,13%
3.	Sarjana	20	42,55%
4.	Pasca Sarjana	26	55,32%
	Total	47	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.1 dapat disimpulkan bahwa responden bependidikan terakhir SMA tidak ada, responden berpendidikan terakhir Diploma berjumlah 1 orang dengan persentase 2,13%, responden berpendidikan terakhir Sarjana berjumlah 20 orang dengan persentase 42,55% dan responden berpendidikan terakhir Pasca Sarjana berjumlah 26 orang dengan persentase 55,32%.

2. Rekapitulasi Jawaban Responden

a. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Ekonomis (X1)

1) Indikator Kualitas

Hasil rekapitulasi jawaban indikator kualitas dapat dilihat pada tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kualitas

Pernyataan		Sangat Setuju		tuju	Ragu-ragu		Same?	idak etuju	Tie	ngat dak tuju
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	14	29,8	19	40,4	5	10,6	9	19,1	0	0,0
P2	13	27,7	29	61,7	4	8,5	1	2,1	0	0,0
P3	13	27,7	28	59,6	6	12,8	0	0,0	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.2 indikator kualitas. Pernyataan pertama, badan atau organisasi memilih sumber daya secara optimal dan mengalokasikan sumber daya tersebut dengan baik. Diketahui 14 (29,8%) responden menyatakan sangat setuju, 19 (40,4%) responden menyatakan setuju, 5 (10,6%) responden menyatakan ragu-ragu, 9 (19,1%) responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kedua, badan atau organisasi melakukan pembelian barang dan jasa dengan kualitas yang tinggi pada harga yang rendah. Diketahui 13 (27,7%) responden menyatakan sangat setuju, 29 (61,7%) responden menyatakan setuju, 4 (8,5%) responden menyatakan ragu-ragu, 1 (2,1%) responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan ketiga, badan atau organisasi dapat meningkatkan mutu pelayanan dan pelayanan yang diberikan tepat pada

sasarannya. Diketahui 13 (27,7%) responden menyatakan sangat setuju, 28 (59,6%) responden menyatakan setuju, 6 (12,8%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

2) Indikator Kuantitas

Hasil rekapitulasi jawaban indikator kuantitas dapat dilihat pada tabel IV.3 sebagai berikut:

Tabel IV.3 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kuantitas

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju Ragu-ragu		u-ragu		idak etuju	Tie	ngat dak tuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P4	16	34,0	21	44,7	6	12,8	3	6,4	1	2,1
P5	11	23,4	28	59,6	8	17,0	0	0,0	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.3 indikator kuantitas. Pernyataan keempat, badan atau organisasi harus melakukan pengalokasian sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Diketahui 16 (34,0%) responden menyatakan sangat setuju, 21 (44,7%) responden menyatakan setuju, 6 (12,8%) responden menyatakan ragu-ragu, 3 (6,4%) responden menyatakan tidak setuju serta 1 (2,1%) responden menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kelima, badan atau organisasi harus dapat mempertimbangkan penggunaan sumber daya dengan kesesuaian

tujuan dan ketepatan waktu. Diketahui 11 (23,4%) responden menyatakan sangat setuju, 28 (59,6%) responden menyatakan setuju, 8 (17,0%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

b. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Efisiensi (X2)

1) Indikator *Input* (Masukan)

Hasil rekapitulasi jawaban indikator *input* (masukan) dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut:

Tabel IV.4
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator *Input* (Masukan)

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	12	25,5	28	59,6	7	14,9	0	0,0	0	0,0
P2	14	29,8	29	61,7	4	8,5	0	0,0	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.4 Indikator *input* (masukan). Pernyataan pertama, badan atau organisasi melakukan pengadaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Diketahui 12 (25,5%) responden menyatakan sangat setuju, 28 (59,6%) responden menyatakan setuju, 7 (14,9%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kedua, badan atau organisasi melindungi dan memelihara sumber daya secara memadai. Diketahui 14 (29,8%) responden menyatakan sangat setuju, 29 (61,7%) responden menyatakan setuju, 4 (8,5%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

2) Indikator *Output* (Keluaran)

Hasil rekapitulasi jawaban indikator *output* (keluaran) dapat dilihat pada tabel IV.5 sebagai berikut:

Tabel IV.5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator *Output* (Keluaran)

Pernyataan	Sangat Setuju		Se	tuju	Ragu-ragu			idak etuju	Tie	ngat dak tuju
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Р3	8	17,0	35	74,5	3	6,4	1	2,1	0	0,0
P4	12	25,5	30	63,8	4	8,5	1	2,1	0	0,0
P5	12	25,5	33	70,2	2	4,3	0	0,0	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.5 Indikator *output* (Keluaran). Pernyataan ketiga, badan atau organisasi dapat menghasilkan *output* yang maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Diketahui 8 (17,0%) responden menyatakan sangat setuju, 35 (74,5%) responden menyatakan setuju, 3 (6,4%) responden menyatakan ragu-ragu, 1 (2,1%) responden yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan keempat, badan atau organisasi menghindari pekerjaan tanpa tujuan atau tidak jelas tujuannya. Diketahui 12 (25,5%) responden menyatakan sangat setuju, 30 (63,8%) responden menyatakan setuju, 4 (8,5%) responden menyatakan ragu-ragu, 1 (2,1%) responden yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kelima, badan atau organisasi harus mendayagunakan sumber daya *output* pada tingkat kapasitas optimal. Diketahui 12 (25,5%) responden menyatakan sangat setuju, 33 (70,2%) responden menyatakan setuju, 2 (4,3%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

c. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Efektivitas (X₃)

1) Indikator Kebijakan

Hasil rekapitulasi jawaban indikator kebijakan dilihat pada tabel IV.6 sebagai berikut:

Tabel IV.6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kebijakan

Pernyataan	Sangat Setuju Set		tuju	Ragu-ragu			idak etuju	T	ngat idak etuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	12	25,5	33	70,2	2	4,3	0	0,0	0	0,0
P2	6	12,8	35	74,5	5	10,6	1	2,1	0	0,0
Р3	11	23,4	31	66,0	5	10,6	0	0,0	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.6 indikator kebijakan. Pernyataan pertama, badan atau organisasi harus dapat mengidentifikasi faktorfaktor yang menghambat kinerja. Diketahui 12 (25,5%) responden menyatakan sangat setuju, 33 (70,4%) responden menyatakan setuju, 2 (4,3%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kedua, badan atau organisasi mempertimbangkan alternative untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya rendah dan tercapiannya tujuan. Diketahui 6 (12,8%) responden menyatakan sangat setuju, 35 (74,5) responden menyatakan setuju, 5 (10,6%) responden menyatakan ragu-ragu dan 1 (2,1%) responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan ketiga, sistem pengendalian manajemen badan atau organisasi mengenai proses dan tanggungjawab sumber daya harus diawasi secara terus menerus. Diketahui 11 (23,4%) responden menyatakan sangat setuju, 31 (66,0%) responden menyatakan setuju, 5 (10,6%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

2) Indikator Prosedur

Hasil rekapitulasi jawaban indikator prosedur dilihat pada tabel IV.7 sebagai berikut:

Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Prosedur

Pernyataan	Sangat Setuju		Se	tuju	Rag	Ragu-ragu		idak etuju	T	ngat idak tuju
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P4	15	31,9	31	66,0	1	2,1	0	0,0	0	0,0
P5	18	38,3	22	46,8	7	14,9	0	0,0	0	0,0
P6	15	31,9	29	61,7	2	4,3	1	2,1	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.7 indikator prosedur. Pernyataan keempat, badan atau organisasi melakukan pengukuran *prosfektif* terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Diketahui 15 (31,9%) responden menyatakan sangat setuju, 31 (66,0%) responden menyatakan setuju, 1 (2,1%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kelima, badan atau organisasi melakukan pengukuran *retrosfektif* terkait penilaian kinerja masa lalu. Diketahui 18 (38,3%) responden menyatakan sangat setuju, 22 (46,8%) responden menyatakan setuju, 7 (14,9%) responden menyatakan

ragu-ragu dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan keenam, badan atau organisasi melakukan pelaporan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Diketahui 15 (31,9%) responden menyatakan sangat setuju, 29 (61,7%) responden menyatakan setuju, 2 (4,3%) responden menyatakan ragu-ragu dan 1 (2,1%) responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

d. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Publlik (Y)

1) Indikator Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Hasil rekapitulasi jawaban indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum dilihat pada tabel IV.8 sebagai berikut:

Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Pernyataan	Sangat Setuju		Se	tuju	Ragu-ragu			idak etuju	T	ngat idak tuju
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	21	44,7	21	44,7	5	10,6	0	0,0	0	0,0
P2	17	36,2	28	59,6	2	4,3	0	0,0	0	0,0
Р3	12	25,5	32	68,1	3	6,4	0	0,0	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.8 indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum. Pernyataan pertama, akuntabilitas kejujuran digunakan

badan dan organisasi dalam melakukan penyusunan anggaran untuk pencapaian tujuan sasaran kinerja. Diketahui 21 (44,7%) responden menyatakan sangat setuju, 21 (44,7%) responden menyatakan setuju, 5 (10,6%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kedua, anggaran disajikan secara transparansi, tepat waktu dan cepat. Diketahui 17 (36,2%) responden menyatakan sangat setuju, 28 (59,6%) responden menyatakan setuju, 2 (4,3%) responden menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan ketiga, penggunaan dana anggaran badan atau organisasi atas hukum dan peraturan yang berlaku guna memberikan hasil kinerja yang lebih baik. Diketahui 12 (25,5%) responden menyatakan sangat setuju, 32 (68,1%) responden menyatakan setuju, 3 (6,4%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

2) Indikator Akuntabilitas Proses

Hasil rekapitulasi jawaban indikator akuntabilitas proses dilihat pada tabel IV.9 sebagai berikut:

Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Proses

Pernyataan	10mm 1 0000	Sangat Setuju		tuju	Rag	u-ragu	1	idak etuju	T	ngat idak etuju
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P4	13	27,7	32	68,1	2	4,3	0	0,0	0	0,0
P5	17	36,2	23	48,9	7	14,9	0	0,0	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.9 indikator akuntabilitas proses. Pernyataan keempat, pengalokasian anggaran badan atau organisasi harus mengikuti proses dan prosedur yang berlaku. Diketahui 13 (27,7%) responden menyatakan sangat setuju, 32 (68,1%) responden menyatakan setuju, 2 (4,3%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kelima, laporan pertanggungjawaban dalam penyajian anggaran badan atau organisasi harus tepat waktu dan menyertakan informasi masa lalu. Diketahui 17 (36,2%) responden menyatakan sangat setuju, 23 (48,9%) responden menyatakan setuju, 7 (14,9%) responden menyatakan ragu-ragu, dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

3) Indikator Akuntabilitas Program

Hasil rekapitulasi jawaban indikator akuntabilitas program dilihat pada tabel IV.10 sebagai berikut:

Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Program

Pernyataan	Sangat Setuju		Se	tuju	Ragu-ragu			idak etuju	T	ngat idak etuju
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P6	17	36,2	29	61,7	1	2,1	0	0,0	0	0,0
P7	16	34,0	30	63,8	1	2,1	0	0,0	0	0,0
P8	11	23,4	30	63,8	6	12,8	0	0,0	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.10 indikator akuntabilitas program. Pernyataan keenam, program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Diketahui 17 (36,2%) responden menyatakan sangat setuju, 29 (61,7%) responden menyatakan setuju, 1 (2,1%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan ketujuh, program anggaran dirancang dengan mepertimbangkan prinsip efektivitas bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Diketahui 16 (34,0%) responden menyatakan sangat setuju, 30 (63,8%) responden menyatakan setuju, 1 (2,1%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kedelaapan, pelaksanaan program yang dilakukan badan atau organisasi dalam melakukan penyusunan anggaran benarbenar dirasakan manfaatnya dalam peningkatan kinerja. Diketahui 11 (23,4%) responden menyatakan sangat setuju, 30 (63,8%) responden menyatakan setuju, 6 (12,8%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

4) Indikator Akuntabilitas Kebijakan

Hasil rekapitulasi jawaban indikator akuntabilitas Kebijakan dilihat pada tabel IV.11 sebagai berikut:

Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Kebijakan

Pernyataan		ngat tuju		tuju	Ragu-ragu			idak etuju	T	ngat idak etuju
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P9	13	27,7	30	63,8	4	8,5	0	0,0	0	0,0
P10	6	12,8	39	83,0	2	4,3	0	0,0	0	0,0
P11	16	34,0	23	48,9	5	10,6	3	6,4	0	0,0

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.11 indikator akuntabilitas kebijakan. Pernyataan kesembilan, kebijakan dan aturan badan atau organisasi yang dibuat oleh pemerintah berguna dalam mengevaluasi kinerja. Diketahui 13 (27,7%) responden menyatakan sangat setuju, 30 (63,8%) responden menyatakan setuju, 4 (8,5%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden yang menyatakan

tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kesepuluh, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus diawasi secara kontinue. Diketahui 6 (12,8%) responden menyatakan sangat setuju, 39 (83,0%) responden menyatakan setuju, 2 (4,3%) responden menyatakan ragu-ragu dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pernyataan kesebelas, pengelolaan anggaran badan atau organisasi dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertikal) dan kepada masyarakat luas (horizontal). Diketahui 16 (34,0%) responden menyatakan sangat setuju, 23 (48,9) responden menyatakan setuju, 5 (10,6%) responden menyatakan ragu-ragu, 3 (6,4%) responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

3. Hasil Pengujian Data

a. Uji Validitas

Uji validitas *(test of validity)* dilakukan untuk mengukur pernyataan yang disusun kedalam kuesioner berdasarkan apakah memiliki validitas atau tidak dan hasilnya akan ditunjukkan oleh suatu indek. Ada 47 responden yang menjawab pernyataan, maka nilai r_{tabel}

untuk N = 47 dengan taraf signifikan 5% adalah df = N-2 = 47-2= 45 diperoleh 0,2876 dibulatkan 0,288.

Suatu pengukuran dikatakan valid jika nilai $r_{hitung} > nilai r_{tabel}$ data yang diuji validitas adalah variabel ekonomis (X_1) , efisiensi (X_2) , Efektivitas (X_3) dan akuntabilitas publik (Y). Hasil dari pengujian masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1) Uji Validitas Variabel Ekonomis (X₁)

Hasil uji validitas variabel ekonomis (X₁) untuk masingmasing pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.12 sebagai berikut:

Tabel IV.12
Hasil *Output* SPSS
Uji Validitas Variabel Ekonomis (X₁)

Pernyataan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,727	0,288	Valid
Pernyataan 2	0,569	0,288	Valid
Pernyataan 3	0,782	0,288	Valid
Pernyataan 4	0,370	0,288	Valid
Pernyataan 5	0,465	0,288	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.12 hasil uji validitas variabel ekonomis (X_1) diperoleh semua pernyataan valid karena nilai $r_{hitung} > nilai$ r_{tabel} .

2) Uji Validitas Variabel Efisiensi (X₂)

Hasil uji validitas variabel efisiensi (X₂) untuk masingmasing pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.13 sebagai berikut:

Tabel IV.13 Hasil *Output* SPSS Uji Validitas Variabel Efisiensi (X₂)

Pernyataan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,485	0,288	Valid
Pernyataan 2	0,705	0,288	Valid
Pernyataan 3	0,551	0,288	Valid
Pernyataan 4	0,646	0,288	Valid
Pernyataan 5	0,444	0,288	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.13 hasil uji validitas variabel efisiensi $(X_2) \ diperoleh \ semua \ pernyataan \ valid \ karena \ nilai \ r_{hitung} > nilai$ $r_{tabel} \, .$

3) Uji Validitas Variabel Efektivitas (X₃)

Hasil uji validitas variabel efektivitas (X₃) untuk masingmasing pernyataan dapat dilihat pada tabel IV.14 sebagai berikut:

Tabel IV.14 Hasil *Output* SPSS Uji Validitas Variabel Efektivitas (X₃)

Pernyataan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,408	0,288	Valid
Pernyataan 2	0,608	0,288	Valid
Pernyataan 3	0,592	0,288	Valid
Pernyataan 4	0,657	0,288	Valid
Pernyataan 5	0,559	0,288	Valid
Pernyataan 6	0,617	0,288	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.14 hasil uji validitas variabel efektivitas $(X_3) \ diperoleh \ semua \ penyataan \ valid \ karena \ nilai \ r_{hitung} > nilai$ $r_{tabel} \ .$



4) Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik (Y).

Hasil uji validitas akuntabilitas publik (Y) untuk masingmasing penyataan dapat dilihat pada tabel IV.15 sebagai berikut:

Tabel IV.15 Hasil *Output* SPSS Uii Validitas Variabel Akuntabilitas Publik (Y)

Pernyataan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,730	0,288	Valid
Pernyataan 2	0,496	0,288	Valid
Pernyataan 3	0,339	0,288	Valid
Pernyataan 4	0,478	0,288	Valid
Pernyataan 5	0,705	0,288	Valid
Pernyataan 6	0,635	0,288	Valid
Pernyataan 7	0,552	0,288	Valid
Pernyataan 8	0.608	0,288	Valid
Pernyataan 9	0,384	0,288	Valid
Pernyataan 10	0,339	0,288	Valid
Pernyataan 11	0,394	0,288	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.15 hasil uji validitas variabel akuntabilitas publik (Y) diperoleh semua pernyataan valid karena nilai $r_{hitung} > nilai \; r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Setelah ditemukan bahwa item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid dengan nilai $r_{hitung} > nilai \; r_{tabel}$, maka selanjutnya pernyataan yang dinyatakan valid tersebut diuji reabilitasnya. Untuk menentukan pernyataan reliable dapat ditentukan apabila nilai r_{hitung} Cronbach's $Alpha > nilai \; r_{tabel}$ Cronbach's Alpha maka dikatakan reliabel dan semakin besar alpha (mendekati 1) maka

dikatakan pertanyaan tersebut reliabl. Ada 47 responden yang menjawab pernyataan, maka nilai r_{tabel} untuk N=47 dengan taraf signifikan 5% adalah df = N-2=47-2=45 diperoleh 0,2876 dibulatkan 0,288.

Hasil uji reliabilitas untuk variabel ekonomis (X_1) , efisiensi (X_2) , Efektivitas (X_3) dan akuntabilitas publik (Y) dapat dilihat pada tabel IV.16 sebagai berikut:

Tabel IV.16 Hasil *Output* SPSS Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai r _{hitung} Cronbach's Alpha	Nilai r _{tabel} Cronbach's Alpha	Keterangan
X_1	0,464	0,288	Reliabel
X ₂	0,475	0,288	Reliabel
X ₃	0,587	0,288	Reliabel
Y	0,723	0,288	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.16 hasil uji reliabilitas diperoleh semua variabel reliabel karena nilai r_{hitung} Cronbach's Alpha > nilai r_{tabel} Cronbach's Alpha.

c. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan análisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terdistribusi dengan normalitas, terbebas dari multikolonieritas dan terbebas dari heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk menguji peyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

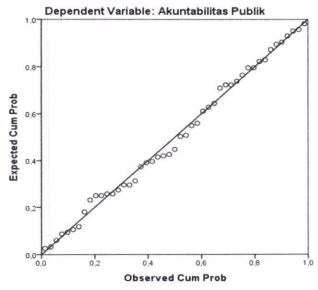
1) Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik Normal P-P plot.

Uji Normal P-P plot jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar IV.2 sebagai berikut:

Gambar IV.2 Hasil *Output* SPSS Uji Normalitas (*Normal P-P plot*)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Hasil Penglahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan gambar IV.2 dapat disimpulkan bahwa grafik

Normal P-P plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal

dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dianggap bebas dari multikolinieritas jika variabel independen penelitian memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Hasil uji multikolonieritas untuk variabel ekonomis (X₁), efisiensi (X₂) dan Efektivitas (X₃) dapat dilihat pada tabel IV.17 sebagai berikut:

Tabel VI.17
Hasil Output SPSS
Uji Multikolonieritas (Tolerance-VIF)

Coefficients^a Model Unstandardized Standardized Т Sig. **Collinearity Statistics** Coefficients Coefficients Std. Error Beta Tolerance VIF В .029 (Constant) ,733 .384 1,910 Ekonomis .067 ,190 2,873 .005 ,761 1,314 ,125 1,369 .090 2,626 ,003 .731 Efisiensi ,238 ,271 4,780 000 637 1,569 Efektivitas 479 ,100 529

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.17 tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

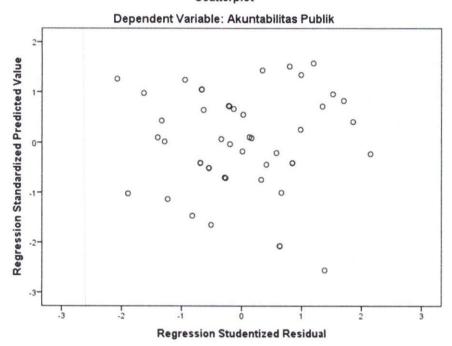
3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *Scatterplot* (nilai prediksi variabel dependen *zpred* dengan residual *sresid*).

Uji *Scatterplot* jika tidak ada pola yang jelas, seperti: titiktitik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar IV.3 sebagai berikut:

Gambar IV.3 Hasil *Output* SPSS Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)

Scatterplot



Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan gambar IV.3 antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu: ekonomis (X_1) , efisiensi (X_2) dan efektivitas (X_3) dengan variabel dependen, yaitu: akuntabilitas publik (Y) apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen

mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel IV.18 sebagai berikut:

Tabel IV.18 Hasil *Output* SPSS Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity	Statistics
	В	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,733	,384		1,910	,029		
Ekonomis	,125	,067	,190	2,873	,005	,761	1,314
Efisiensi	,238	,090	,271	2,626	,003	,731	1,369
Efektivitas	,479	,100	,529	4,780	,000	,637	1,569

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.18 hasil uji regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$Y = 0.733 + 0.125 X_1 + 0.238 X_2 + 0.479 X_3$$

Persamaan regresi linier berganda ini mengandung arti sebagai berikut:

a = Nilai konstanta perpotongan garis pada sumbu X

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diperoleh nilai konstanta sebesar 0,733. Artinya nilai variabel ekonomis (X₁), efisiensi (X₂) dan efektivitas (X₃) nilainya adalah 0, maka akuntabilitas publik (Y) nilainya adalah 0,733.

b₁ = Pengaruh ekonomis terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien variabel ekonomis (X₁) sebesar 0,125 atau 12,5%. Artinya jika variabel ekonomis meningkat 100%, maka variabel ekonomis berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik meningkat sebesar 0,125 atau 12,5% dan sebaliknya jika variabel ekonomis menurun 100%, maka variabel ekonomis akan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik menurun sebesar 0,125 atau 12,5%.

Korelasi bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara variabel ekonomis (X_1) dengan variabel akuntabilitas publik (Y). Semakin naik variabel ekonomis (X_1) , maka semakin meningkat variabel akuntabilitas publik (Y).

b₂ = Pengaruh efisiensi terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada
 Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien variabel efisiensi (X₂) sebesar 0,238 atau 23,8%. Artinya jika variabel efisiensi meningkat 100%, maka variabel efisiensi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik meningkat sebesar 0,238 atau 23,8% dan sebaliknya jika variabel efisiensi menurun 100%, maka variabel efisiensi akan

berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik menurun sebesar 0,238 atau 23,8%.

Korelasi bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara variabel efisiensi (X₂) dengan variabel akuntabilitas publik (Y). Semakin naik variabel efisiensi (X₂), maka semakin meningkat variabel akuntabilitas publik (Y).

b₃ = Pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien variabel efektivitas (X₃) sebesar 0,479 atau 47,9%. Artinya jika variabel efektivitas meningkat 100%, maka variabel efektivitas berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik meningkat sebesar 0,479 atau 47,9% dan sebaliknya jika variabel efektivitas menurun 100%, maka variabel efisiensi akan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik menurun sebesar 0,479 atau 47,9%.

Korelasi bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara variabel efektivitas (X₃) dengan variabel akuntabilitas publik (Y). Semakin naik variabel efektivitas (X₃), maka semakin meningkat variabel akuntabilitas publik (Y).

Hasil análisis dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel ekonomis (X_1) ,

efisiensi (X₂) dan efektivitas (X₃) adalah positif, maka mengakibatkan kenaikan pada akuntabilitas publik (Y).

e. Uji Hipotesis

1) Pengujian Hipotesisi Secara Parsial (Uji t)

Cara yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekonomis, efisiensi dan efektivitas terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel IV.19 sebagai berikut:

Tabel IV.19 Hasil *Output* SPSS Uji Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstand Coeffic		Standardized Coefficients	Т	Sig.	Collinearity	Statistics
	В	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,733	,384		1,910	,029		
Ekonomis	,125	,067	,190	2,873	,005	,761	1,314
Efisiensi	,238	,090	,271	2,626	,003	,731	1,369
Efektivitas	,479	,100	,529	4,780	,000	,637	1,569

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.19 hasil uji hipotesis secara parsial diketahui nilai r_{hitung} untuk ekonomis (X_1) sebesar 2,873, efisiensi (X_2) sebesar 2,626 dan efektivitas (X_3) sebesar 4,780. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} untuk ekonomis (X_1) sebesar 0,005, efisiensi (X_2) sebesar 0,003 dan efektivitas (X_3) sebesar 0,000.

a) Pengujian koefisien regresi variabel ekonomis (X₁)

(1) Menentukan hipotesis

H_{o1}: Ekonomis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

H_{a1}: Ekonomis berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

(2) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%

Taraf nyata dari nilai t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db)

- = n-k-l, jadi taraf nyata dari nilai t_{tabel} adalah (db) = 47-3-1
- = 43 sehingga nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 2,017.

(3) Kriteria pengujian

 H_0 ditolak karena nilai t_{hitung} 2,873 > nilai t_{tabel} 2,017. Berdasarkan kriteria pengujian H_0 ditolak karena nilai t_{sig} 0,005 < nilai 0,05

(4) Kesimpulan

Nilai t_{hitung} 2,873 > nilai t_{tabel} 2,017 maka hipotesis H_0 ditolak jadi secara parsial ekonomis berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} karena nilai t_{sig} 0,005 < nilai 0,05, jadi ekonomis

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas publik.

b) Pengujian koefisien regresi variabel efisiensi (X₂)

(1) Menentukan hipotesis

H_{o2}: Efisiensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

H_{a2}: Efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

(2) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%

Taraf nyata dari nilai t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db)

- = n-k-l, jadi taraf nyata dari nilai t_{tabel} adalah (db) = 47-3-1
- = 43 sehingga nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 2,017.

(3) Kriteria pengujian

 H_0 ditolak karena nilai t_{hitung} 2,626 > nilai t_{tabel} 2,017. Berdasarkan kriteria pengujian H_0 ditolak karena nilai t_{sig} 0,003 < nilai 0,05

(4) Kesimpulan

Nilai t_{hitung} 2,626 > nilai t_{tabel} 2,017 maka hipotesis H_0 ditolak jadi secara parsial efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig}

karena nilai t_{sig} 0,003 < nilai 0,05, jadi efisiensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas publik.

c) Pengujian koefisien regresi variabel efektivitas (X₃)

(1) Menentukan hipotesis

H_{o3}: Efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

H_{a3}: Efektivitas berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

(2) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%

Taraf nyata dari nilai t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db)

- = n-k-l, jadi taraf nyata dari nilai t_{tabel} adalah (db) = 47-3-1
- = 43 sehingga nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 2,017.

(3) Kriteria pengujian

 H_0 ditolak karena nilai t_{tabel} 4,780 > nilai t_{tabel} 2,017. Berdasarkan kriteria pengujian H_0 ditolak karena nilai t_{sig} 0,000 < nilai 0,05

(4) Kesimpulan

Nilai $t_{\rm hitung}$ 4,780 > nilai $t_{\rm tabel}$ 2,017 maka hipotesis H_0 ditolak jadi secara parsial efektivitas berpengaruh terhadap . akuntabilitas publik. Berdasarkan kriteria pengujian nilai $t_{\rm sig}$

karena nilai t_{sig} 0,000 < nilai 0,05, jadi efektivitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas publik.

2) Pengujian Hipotesisi Secara Simultan (Uji F)

Cara yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel IV.20 sebagai berikut:

Tabel IV.20 Hasil *Output* SPSS Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Mode	el	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	2,811	3	,937	28,427	,000 ^b
1	Residual	1,417	43	,033		
	Total	4,228	46			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.20 hasil uji hipotesis secara simultan diketahui nilai F_{hitung} untuk variabel independen *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) sebesar 28,427. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{Sig} untuk variabel independen *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) sebesar 0,000.

b. Predictors: (Constant), Efektivitas, Ekonomis, Efisiensi

 a) Pengujian koefisien regresi variabel independen value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).

(1) Menentukan hipotesis

H₀₄: Value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas)
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi
kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota
Palembang).

H_{a4}: Value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

(2) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%

Taraf nyata dari nilai F_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-l, jadi taraf nyata dari F_{tabel} adalah (db) = 47-3-1 = 43 sehingga F_{tabel} diperoleh sebesar 2,820.

(3) Kriteria pengujian

 H_0 ditolak karena nilai $F_{\rm hitung}$ 28,427 > nilai $F_{\rm tabel}$ 2,820. Berdasarkan kriteria pengujian H_0 ditolak karena nilai $F_{\rm sig}$ 0,000 < nilai 0,05.

(4) Kesimpulan

Nilai F_{hitung} 28,427 > nilai F_{tabel} 2,820 maka hipotesis H_0 ditolak jadi secara simultan *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh terhadap akuntabilitas

publik. Berdasarkan kriteria pengujian nilai F_{sig} karena nilai F_{sig} 0,000 < nilai 0,05, jadi *Value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas publik.

f. Koefisien Determinasi

Tabel IV.21
Hasil *Output* SPSS
Koefisien Determinasi (R *Square*)

	Model Summary⁵								
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate					
				Estimate					
1	,815 ^a	,665	,641	,18155					

a. Predictors: (Constant), Efektivitas, Ekonomis, Efisiensi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Version 20, 2015

Berdasarkan tabel IV.21 hasil uji koefisien determinasi (R square) dan diperoleh nilai R square (R²) sebesar 0,665 atau 66,5%. Nilai R square (R²) artinya bahwa antara variabel independen value for money (ekonomis, efisien dan efektivitas) secara simultan atau bersama-sama mampu memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas sebesar 66,5%. Sisanya sebesar 33,5% (100% - 66,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Pengaruh Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)

Hasil penelitian ini dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial ekonomis, efisiensi dan efektivitas berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai $t_{\rm hitung} >$ nilai $t_{\rm tabel}$ dan nilai $t_{\rm sig} < 0.05$.

Secara simultan value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai $F_{hitung} > nilai F_{tabel}$ dan nilai $t_{sig} < 0.05$, Nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti terdapat pengaruh positif dari value for Money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

Penelitian ini juga membuktikan penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Sri (2009), value for money memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik, apabila value for money dapat diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dapat terwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri. Begitu sebaliknya apabila value for money tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik pun tidak akan maksimal.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R square) menunjukkan besarnya pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang) diperoleh sebesar 66,5% dan sisanya sebesar 33,5% (100% - 66,5%) dipengaruhi oleh variabel lain.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa:

- a. Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai $t_{\rm hitung}$ 2,873 > nilai $t_{\rm tabel}$ 2,017 dan nilai $t_{\rm sig}$ 0,005 < 0,05.
- b. Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai t_{hitung} 2,626 > nilai t_{tabel} 2,017 dan nilai t_{sig} 0,002 < 0,05.
- c. Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai $t_{\rm hitung}$ 4,780 > $t_{\rm tabel}$ 2,017 dan nilai $t_{\rm sig}$ 0,000 < 0,05.

2. Berdasarkan pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa:

a. Value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang). Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai nilai F_{hitung} 28,427 > F_{tabel} 2,820 dan nilai F_{sig} 0,000 < 0,05. Jadi semakin baik tingkat *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) yang diterapkan maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas publik pada Badan Pemerintah Daerah.

Nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dari *value for Money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R square) menunjukkan besarnya pengaruh value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang) diperoleh sebesar 66,5% dan sisanya sebesar 33,5% (100% - 66,5%) dipengaruhi oleh variabel lain.

B. SARAN

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka dapat diberikan saran mengenai pengaruh *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang), diantaranya:

 Sebaiknya, Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam melakukan pemeliharaan dan pembelian barang dan jasa harus diperkirakan dengan

- baik dalam hal kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan agar tidak terjadi pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- Sebaiknya, Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang dimana barang dan jasa yang dibeli haruslah dapat mencapai keluaran (output) yang maksimal dan menghindari terjadinya praktik-praktik yang tidak menghasilkan output termasuk dalam pengelolaan sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi.
- 3. Sebaiknya, Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan dan kesesuaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan harus dapat mempertimbangkan alternative lain yang memberikan hasil dan manfaat yang sama dengan biaya yang paling rendah.
- 4. Sebaiknya, Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang meningkatkan akuntabilitas publik Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang yang merupakan unit pelayanan haruslah memberikan apa yang telah dikehendaki oleh masyarakat mengenai pertanggungjawaban atas value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).

Karena *value for Money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) memiliki peranan penting dalam terwujudnya akuntabilitas publik, apabila *value for Money* dapat diterapkan dengan baik maka akuntabilitas publik dapat terwujud seiring dengan perkembangan *value for money* itu sendiri. Begitu sebaliknya apabila *value for money* tidak diterapkan dengan baik maka akuntabilitas publik pun tidak akan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Danang Sunyoto. 2013. **Metodologi Penelitian Akuntansi.** Cetakan kesatu, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dwi Priyatno. 2012. **Balajar Praktis Analisis Parametrik dan** *Non* **Parametrik dengan** *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gava Media.
- Harun. 2009. **Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia.** Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. **Akuntansi Sektor Publik.** Edisi Pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2006. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.** Erlangga, Semarang: PT. Gramedia.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) No. 690.900-327 Tahun 2006. **Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan,** Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahmudi. 2010. **Manajemen Kinerja Sektor Publik.** Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun. 2006. **Pengukuran Akuntansi Sektor Publik.** Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Firma, dan Heribertus. 2013. **Akuntansi Sektor Publik.** Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi keempat, Yogyakarta: CV Andi.
- Muindro Renyowijoyo. 2010. **Akuntansi Sektor Publik Organisasi** *Non* **Laba.** Edisi kedua, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sri Dewi Anggadini. 2009. **Pengaruh** *Value For Money* **Terhadap Kualitas Pelayanan Publik.** *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume 1, Nomor 1, Halaman 80-95 (online), (http://ak.unicom.ac.id/admin/jurnal/Jurnal%20Riset%20 Akuntansi%20%20Vol%201_No.1_Oktober%202009_Sri%Dewi%20Anggadini_pdf, diakses 27 April 2014, pukul 16:28 WIB).
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Bisnis.** Cetakan ke-16, Bandung: CV ALFABETA.

- Syofian Siregar. 2010. **Statistik Deskriptif Untuk Penelitian.** Jakarta: Penerbit Raja Grasindo Perkasa.
- Taufik Kurrohman. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Halaman 1-11 (online), (http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/2558/2661, diakes 03 April 2014, pukul 21:17 WIB).
- Tri Siwi Nugrahani. 2007. **Analisis Penerapan Konsep** *Value For Money* pada **Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.** *Jurnal penelitian*, Volume 1, Halaman 1-17 (online), (http://economi.upy.ac.id/files/analisis%20penerapan%20konsep%20*value*%20*for*%20*money*%20pada%20pemerintah%2-0Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20_Tri%20Siwi%20Nugrahani_pdf, diakses 7 Mei 2014, pukul 08:54 WIB).



Website: umpalembang.net/feump

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Institusi Perguruan Tinggi Akreditasi Program Studi Manajemen (S1) Program Studi Akuntansi (S1) Program Studi Manajemen Pemasaran (D3) Nomor: 005/BAN-PT/Ak-x/Dpl-III/VI/2010 (B)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B) Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S1/I/2014 (B) Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011(B)

Email: feumpalembang@gmail.com

Alamat: Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp/Fax: (0711) 511433 - (0711) 518018

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH VALUE FOR MONEY (EKONOMIS, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS) TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)

Perihal

: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth Bapak/Ibu Responden di-Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir Program Strata Satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, yang mana salah satu persyaratannya adalah melakukan penelitian untuk keperluan mendapatkan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden, sebagaimana "Daftar Kuesioner" yang telah dilampirkan bersamaan surat ini.

Judul penelitian ini adalah Pengaruh Value For Money (Ekonomis,

Efisiensi dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada

Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu

untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan dipergunakan dalam

penelitian. Sesuai dengan kode etik dalam penelitian, informasi yang Bapak/Ibu

berikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya ditujukan untuk kepentingan

ilmiah. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak

ternilai bagi peneliti.

Akhir kata, atas segala perhatian dan bantuannya peneliti ucapkan terima

kasih.

Peneliti,

Julius Saputra

A.	Identitas Responden			
	1. Nama Responden	:		
	2. Badan Pemerintah	:		
	3. Posisi Jabatan	:		
	4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
			Perempuan	
	4. Usia	:	Di bawah 30 tahun	
			31 - 40 tahun	
			Di atas 41 tahun	
	5. Pendidikan terakhir	:	SMA	
			Diploma	
			Sarjana	
			Pasca Sarjana	
				Tondo Tongon
				Tanda Tangan,

B. Pernyataan

Terdapat lima (5) pilihan jawaban yang tersedia, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda benar ($\sqrt{}$) pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapatan dan jawaban yang dianggap benar.

Keterangan:

a.	Jika jawaban anda (SS) Sangat Setuju "dengan point"	: 5
b.	Jika jawaban anda (S) Setuju "dengan point"	: 4
c.	Jika jawaban anda (RR) Ragu-Ragu "dengan point"	: 3
d.	Jika jawaban anda (TS) Tidak Setuju "dengan point"	: 2
e.	Jika jawaban anda (STS) Sangat Tidak Setuju "dengan point"	: 1

1. Variabel Ekonomis (X₁)

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
Kua	litas					
1.	Badan atau organisasi memilih sumber daya secara optimal dan mengalokasikan sumber daya tersebut dengan baik.					
2.	Badan atau organisasi melakukan pembelian barang dan jasa dengan kualitas yang tinggi pada harga yang rendah.					
3.	Badan atau organisasi dapat meningkatkan mutu pelayanan dan pelayanan yang diberikan tepat pada sasarannya.					

Kua	intitas			
4.	Badan atau organisasi harus melakukan pengalokasian sumber daya sesuai dengan kebutuhan.			
5.	Badan atau organisasi harus dapat mempertimbangkan penggunaan sumber daya dengan kesesuaian tujuan dan ketepatan waktu.			

2. Variabel Efisiensi (X2)

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
Inpu	at (Masukan)					
1.	Badan atau organisasi melakukan pengadaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan.					
2.	Badan atau organisasi melindungi dan memelihara sumber daya secara memadai.					
Outp	out (Keluaran)					A SPECIAL
3.	Badan atau organisasi dapat menghasilkan <i>output</i> yang maksimal dengan sumber daya yang dimiliki.					
4.	Badan atau organisasi menghindari pekerjaan tanpa tujuan atau tidak jelas tujuannya.					
5.	Badan atau organisasi harus mendayagunakan sumber daya <i>output</i> pada tingkat kapasitas optimal.					

3. Variabel Efektivitas (X₃)

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
Keb	ijakan					
1.	Badan atau organisasi harus dapat mengidentifikasi faktor-fakktor yang dapat menghambat kinerja.					
2.	Badan atau organisasi mempertimbangkan alternative untuk melaksanakan program kegiatan yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya terendah dan tercapainya tujuan.					
3.	Sistem pengendalian manajemen badan atau organisasi mengenai proses dan tanggunngjawab sumber daya harus diawasi secara terus menerus.					
Pros	sedur					
4.	Badan atau organisasi melakukan pengukuran <i>prosfektif</i> terkait dengan perencanaa kinerja di masa yang akan datang.					
5.	Badan atau organisasi melakukan pengukuran retrosfektif terkait penilaian kinerja masa lalu.					
6.	Badan atau organisasi melakukan pelaporan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.					

4. Variabel Akuntabilitas Publik (Variabel Y)

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
Aku	ntabilitas Kejujuran dan Hukum					
1.	Akuntabilitas kejujuran digunakan badan atau organisasi dalam melakukan penyusuan anggaran untuk mencapai tujuan.					
2.	Anggaran disajikan secara transparansi, tepat waktu dan cepat.					
3.	Penggunaan dana anggaran badan atau organisasi didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku guna memberikan hasil kinerja yang baik.					
Aku	ntabilitas Proses					
4.	Pengalokasian anggaran badan atau organisasi mengikuti proses dan prosedur yang berlaku.					
5.	Laporan pertanggungjawaban dalam penyajian anggaran badan atau organisasi harus tepat waktu dan menyertakan informasi masa lalu.					
Aku	ntabilitas Program					
6.	Program dalam badan atau organisasi dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.					
7.	Program anggaran dirancang dengan mepertimbangkan prinsip efektivitas bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus dapat mencapai target yang telah ditetapkan.					

8.	Pelaksanaan program yang dilakukan badan atau organisasi dalam melakukan penyusunan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kinerja.	
Aku	ntabilitas Kebijakan	
9.	Kebijakan dan aturan badan atau organisasi yang dibuat oleh pemerintah berguna dalam mengevaluasi kinerja.	
10.	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus diawasi secara terus menerus atau continue.	
11.	pengelolaan anggaran badan atau organisasi dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertikal) dan kepada masyarakat luas (horizontal).	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHA PALEMBANG **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

| Institusi Perguruan Tinggi | Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | (B)
| Akreditasi | Program Studi Manajemen (S1) | Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/SI/I/2014 | (B)
| Program Studi Akuntansi (S1) | Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-X/III/SI/III/2011 | (B)
| Program Studi Manajemen Pemasaran (D3) | Nomor: 005/BAN-PT/Ak-x/Dpl-III/VI/2010 | (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email: feumpalembang@gmail.com

Alamat: Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp/Fax: (0711) 511433 - (0711) 518018



Lampiran 2

KETERANGAN PERSETUJUAN PENYEBARAN **KUESIONER PENELITIAN**

No.	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Nama : Badan Keluarga dan Pemberdaya KotaPalembang	aan Perempuan
	Diterima : H. NASIA Dikembalikan : 16-1-3	
2.	Nama : Badan Penanggi Bencana dan Pe Kebakaran Kota Diterima : R.M. Acardi	madam Palembang
	Dikembalikan: Ir. H. Raden 1	Dignya M. Yusur MM (7)
3.	Nama Badan Kepegawa Daerah dan Dikl Palembang Diterima M. A24 Fe67 Dikembalikan AURIANUS	at Kota 12/_15. BADAIR KEPEGAWANA ZAH
4.	Nama : Badan Pembangu Daerah (BAPPE Palembang Diterima : SULASTRI (F Dikembalikan : Lika Riman	DA) Kota
5.	Nama : Badan Koordinas Modal Daerah K Diterima : Herlin Dikembalikan : Lia	O W-12 TOPPINASI

		FINT TO
6.	Nama : Badan Kesatuan Bangsa,	1-2019
	dan Politik Kota Palembang	110/20 BACAGO
	Diterima : /NOR12 (7)	1000
	Dikembalikan	
7.	Nama : Badan Lingkungan Hidup	COURT AND
	Kota Palembang	k 15
		Mr. 15 pr. 016
	,	1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Dikembalikan: KMS. H. Panji, SE	
8.	Nama : Badan Pemberdayaan	STRINTAH A
	Masyarakat dan Kelurahan	
	Kota Palembang	12/15
	Diterima : Discele Farored, 15, mm	*(BPMA
	Dikembalikan: Discele Faceleat, Sa, na	10/
		The state of the s
9.	Nama : Badan Arsip, Perpusatakaan dan	
	Dokumentasi Kota Palembang	
	Diterima : #TRI	PENCUSTARAL P
	Dikembalikan : +TR	A COMMENTARY AND A COMMENTARY
	111	
		EMBA

		Ekonomis (X1)							Efisie	nsi (X	2)				Efel	ktivita	as (X3))						Akun	tabili	tas Pu	blik (Y)			
Resp.	P1	P2		P4	P5	X1	P1	P2	P3		P5	X2	P1	P2	P3	P4	P5	P6	X3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P 7	P8	P9	10	P11	Y
1	4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	5	19	5	4	3	4	3	4	23	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	40
2	2	4	4	4	4	18	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	5	5	27	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	49
3	2	4	4	5	4	19	4	5	4	5	4	22	4	2	4	5	5	4	24	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	50
4	5	5	4	4	4	22	4	5	4	5	4	22	4	4	5	4	5	5	27	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	48
5	5	5	4	4	4	22	4	5	4	5	4	22	4	4	5	4	5	5	27	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	48
6	5	4	5	4	4	22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	4	25	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	44
7	5	5	4	1	5	20	5	3	4	1	4	17	4	5	5	4	3	5	26	5	5	4	4	3	4	5	5	3	5	3	46
8	2	4	4	4	4	18	5	4	4	4	5	22	5	5	4	4	5	4	27	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	47
9	2	4	3	5	3	17	5	5	4	5	4	21	4	4	4	4	5	5	26	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	51
10	4	4	5	2	5	20	5	5	4	5	4	21	4	4	4	4	5	5	26	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	2	48
11	2	4	4	4	5	19	4	5	5	5	4	21	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	46
12	5	4	5	5	4	23	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	47
13	5	5	5	5	4	24	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	47
14	2	5	4	4	5	20	4	5	5	5	4	23	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	46
15	4	4	5	5	4	22	4	4	4	5	5	22	5	4	4	5	4	4	26	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	48
16	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
17	5	5	4	4	4	22	3	4	5	4	4	20	4	4	5	5	5	4	27	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	48
18	4	4	4	4	3	19	3	4	5	5	4	20	4	5	4	5	5	4	27	5	4	3	4	5	5	5	4	5	4	4	48
19	5	4	5	5	3	22	3	4	3	5	4	19	4	4	3	5	5	4	25	5	4	3	4	3	5	5	3	5	4	5	46
20	3	3	3	3	3	15	4	3	3	4	3	17	3	4	4	4	3	3	21	3	5	4	5	4	3	4	3	4	4	4	42
21	2	3	3	4	4	16	3	4	4	4	4	19	4	3	3	4	3	4	21		4	4		3	4	4	3	4	4	4	42
22	3	3	3	4	3	16	4	4	4	3	4	19	4	3	4	3	3	4	21	3	3	5	3	3	4	3	4	4	4	3	42
23	3	3	4	3	4	17	4	4	5	4	195	20	5	4	4	5	5	5	23	5	5		4	5	4	5	4	4	4	2	46
24	5	5	5	2 2	4	19	5	5		5	5	23	5	4	5	5	4	4	28 27	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	2	48
25		125				18	4	_	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
26	5	2	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
27		5	5	4	4	22	4	5	2	3	5	19	5	3	3	4	4	2	21	4	3	5	5	3	4	4	3	3	3	4	41
28	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
29 30	2	4	3	5	3	17	4	4	4	3	4	19	4	3	4	4	4	5	24	4	5	4	3	4	5	4	4	3	4	5	45
31	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	5	26	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
32	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
33	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
34	2	4	4	4	5	19	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
35	5	5	3	3	4	20	4	4	4	4	5	21	5	5	5	5	4	4	28	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	46
36	3	4	4	3	3	17	3	3	4	3	4	17	4	4	3	5	5	5	21	4	5	4	4	4	5	5	3	4	4	3	45
37	3	4	4	3	3	17	3	5	4	4	3	19	3	3	4	4	4	4	22	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	41
38	4	4	5	5	5	23	4	5	4	4	5	22	5	4	5	4	3	5	21	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	52
39	4	4	4	5	5	22	5	5	5	4	5	19	5	5	4	5	3	5	27	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	51
40	4	4	5	5	5	21	5	4	4	4	4	21	4	4	4	5	5	5	27	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	52
41	5	5	5	5	4	24	5	5	4	4	4	22	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	53
42	4	4	4	3	5	20	4	5	5	5	4	23	4	4	5	4	5	4	26	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	51
43	4	5	5	5	4	23	5	4	5	4	5	23	4	4	5	5	4	5	27	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	52
44	5	4	5	5	5	24	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	4	28	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	52
45	4	4	4	5	4	21	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	5	4	25	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	47
46	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	47
47	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	47

Lampiran 4

Uji Validitas Variabel Ekonomis (X1)

Correlations

		Ekonomis 1	Ekonomis 2	Ekonomis 3	Ekonomis 4
Ekonomis 1	Pearson Correlation	1	,378	,496	-,059
	Sig. (2-tailed)		,009	,000	,695
	N	47	47	47	47
Ekonomis 2	Pearson Correlation	,378**	1	,315	-,108
	Sig. (2-tailed)	,009		,031	,472
	N	47	47	47	47
Ekonomis 3	Pearson Correlation	,496	,315	1	,175
	Sig. (2-tailed)	,000	,031		,240
	N	47	47	47	47
Ekonomis 4	Pearson Correlation	-,059	-,108	,175	1
	Sig. (2-tailed)	,695	,472	,240	
	N	47	47	47	47
Ekonomis 5	Pearson Correlation	,145	,235	,411"	-,143
	Sig. (2-tailed)	,332	,112	,004	,338
	N	47	47	47	47
Total	Pearson Correlation	,727**	,569	,782	,370
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,011
	N	47	47	47	47

		Ekonomis 5	Total
Ekonomis 1	Pearson Correlation	,145	,727
	Sig. (2-tailed)	,332	,000
	N	47	47
Ekonomis 2	Pearson Correlation	,235	,569
	Sig. (2-tailed)	,112	,000
	N	47	47
Ekonomis 3	Pearson Correlation	,411**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000
	N	47	47
Ekonomis 4	Pearson Correlation	-,143	,370*
	Sig. (2-tailed)	,338	,011
	N	47	47
Ekonomis 5	Pearson Correlation	1	,465
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	47	47
Total	Pearson Correlation	,465**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	47	47

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Efisiensi (X2)

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Efisiensi 1	Efisiensi 2	Efisiensi 3	Efisiensi 4
Efisiensi 1	Pearson Correlation	1	,113	,102	-,119
	Sig. (2-tailed)		,449	,497	,425
	N	47	47	47	47
Efisiensi 2	Pearson Correlation	,113	1	,219	,555
	Sig. (2-tailed)	,449		,139	,000
	N	47	47	47	47
Efisiensi 3	Pearson Correlation	,102	,219	1	,246
	Sig. (2-tailed)	,497	,139		,096
	N	47	47	47	47
Efisiensi 4	Pearson Correlation	-,119	,555	,246	1
	Sig. (2-tailed)	,425	,000	,096	
	N	47	47	47	47
Efisiensi 5	Pearson Correlation	,333	,064	,027	-,004
	Sig. (2-tailed)	,022	,671	,856	,980
	N	47	47	47	47
Total	Pearson Correlation	,485	,705	,551	,646
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000
	N	47	47	47	47

Correlations

		Efisiensi 5	Total
Efisiensi 1	Pearson Correlation	,333	,485
	Sig. (2-tailed)	,022	,001
	N	47	47
Efisiensi 2	Pearson Correlation	,064	,705
	Sig. (2-tailed)	,671	,000
	N	47	47
Efisiensi 3	Pearson Correlation	,027	,551
	Sig. (2-tailed)	,856	,000
	N	47	47
Efisiensi 4	Pearson Correlation	-,004	,646**
	Sig. (2-tailed)	,980	,000
	N	47	47
Efisiensi 5	Pearson Correlation	1	,444
1	Sig. (2-tailed)		,002
	N	47	47
Total	Pearson Correlation	,444	1
	Sig. (2-tailed)	,002	
	N	47	47

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Efektivitas 1	Efektivitas 2	Efektivitas 3	Efektivitas 4
Efektivitas 1	Pearson Correlation	1	,316	,054	,255
	Sig. (2-tailed)		,031	,720	,084
	N	47	47	47	47
Efektivitas 2	Pearson Correlation	,316	1	,339	,248
	Sig. (2-tailed)	,031		,020	,093
	N	47	47	47	47
Efektivitas 3	Pearson Correlation	,054	,339	1	,165
	Sig. (2-tailed)	,720	,020		,268
	N	47	47	47	47
Efektivitas 4	Pearson Correlation	,255	,248	,165	1
	Sig. (2-tailed)	,084	,093	,268	
	N	47	47	47	47
Efektivitas 5	Pearson Correlation	-,082	,067	,140	,413
	Sig. (2-tailed)	,583	,653	,346	,004
	N	47	47	47	47
Efektivitas 6	Pearson Correlation	,045	,195	,334	,252
	Sig. (2-tailed)	,766	,190	,022	,087
	N	47	47	47	47
Total	Pearson Correlation	,408	,608	,592	,657**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000
	N	47	47	47	47

		Efektivitas 5	Efektivitas 6	Total
Efektivitas 1	Pearson Correlation	-,082	,045	,408
	Sig. (2-tailed)	,583	,766	,004
	N	47	47	47
Efektivitas 2	Pearson Correlation	,067	,195	,608
	Sig. (2-tailed)	,653	,190	,000
	N	47	47	47
Efektivitas 3	Pearson Correlation	,140	,334*	,592**
	Sig. (2-tailed)	,346	,022	,000
	N	47	47	47
Efektivitas 4	Pearson Correlation	,413	,252	,657**
	Sig. (2-tailed)	,004	,087	,000
	N	47	47	47
Efektivitas 5	Pearson Correlation	1	,218	,559**
	Sig. (2-tailed)		,142	,000
	N	47	47	47
Efektivitas 6	Pearson Correlation	,218	1	,617**
	Sig. (2-tailed)	,142		,000
	N	47	47	47
Total	Pearson Correlation	,559**	,617	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	47	47	47

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik (Y)

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Akuntabilitas Publik 1	Akuntabilitas Publik 2
Akuntabilitas Publik 1	Pearson Correlation	1	,403
	Sig. (2-tailed)		,005
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 2	Pearson Correlation	,403	1
	Sig. (2-tailed)	,005	
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 3	Pearson Correlation	,057	,009
	Sig. (2-tailed)	,705	,951
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 4	Pearson Correlation	,141	,112
	Sig. (2-tailed)	,344	,453
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 5	Pearson Correlation	,405	,329
	Sig. (2-tailed)	,005	,024
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 6	Pearson Correlation	,408	,217
	Sig. (2-tailed)	,004	,144
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 7	Pearson Correlation	,624	,320
	Sig. (2-tailed)	,000	,028
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 8	Pearson Correlation	,560**	,288
	Sig. (2-tailed)	,000	,050
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 9	Pearson Correlation	,391	,144
	Sig. (2-tailed)	,007	,333
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 10	Pearson Correlation	,210	,261
	Sig. (2-tailed)	,156	,076
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 11	Pearson Correlation	-,027	-,121
	Sig. (2-tailed)	,856	,418
	N	47	47
Total	Pearson Correlation	,730	,496
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	47	47

		Akuntabilitas Publik 3	Akuntabilitas Publik 4
Akuntabilitas Publik 1	Pearson Correlation	,057	,141
	Sig. (2-tailed)	,705	,344
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 2	Pearson Correlation	,009	,112
	Sig. (2-tailed)	,951	,453
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 3	Pearson Correlation	1	,303
	Sig. (2-tailed)		,038
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 4	Pearson Correlation	,303	1
	Sig. (2-tailed)	,038	
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 5	Pearson Correlation	,064	,465
	Sig. (2-tailed)	,671	,001
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 6	Pearson Correlation	,150	,261
	Sig. (2-tailed)	,314	,077
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 7	Pearson Correlation	,010	,040
	Sig. (2-tailed)	,947	,791
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 8	Pearson Correlation	,273	,128
	Sig. (2-tailed)	,063	,392
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 9	Pearson Correlation	-,121	-,008
	Sig. (2-tailed)	,418	,959
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 10	Pearson Correlation	,023	-,096
	Sig. (2-tailed)	,877	,521
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 11	Pearson Correlation	,195	,290*
	Sig. (2-tailed)	,190	,048
	N	47	47
Total	Pearson Correlation	,339	,478
- 1-100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	Sig. (2-tailed)	,020	,001
	N	47	47

		Akuntabilitas Publik 5	Akuntabilitas Publik 6
Akuntabilitas Publik 1	Pearson Correlation	.405	,408
	Sig. (2-tailed)	,005	,004
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 2	Pearson Correlation	,329	,217
	Sig. (2-tailed)	,024	,144
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 3	Pearson Correlation	,064	,150
	Sig. (2-tailed)	,671	,314
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 4	Pearson Correlation	,465	,261
	Sig. (2-tailed)	,001	,077
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 5	Pearson Correlation	1	,458
	Sig. (2-tailed)	100	,001
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 6	Pearson Correlation	,458**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	1000
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 7	Pearson Correlation	,233	,395
	Sig. (2-tailed)	,115	,006
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 8	Pearson Correlation	,418	,160
	Sig. (2-tailed)	,003	,283
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 9	Pearson Correlation	,114	,140
	Sig. (2-tailed)	,445	,349
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 10	Pearson Correlation	,089	-,037
	Sig. (2-tailed)	,553	,806
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 11	Pearson Correlation	,260	,361
	Sig. (2-tailed)	,077	,013
	N	47	47
Total	Pearson Correlation	,705	,635
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	47	47

			
		Akuntabilitas Publik 7	Akuntabilitas Publik 8
Akuntabilitas Publik 1	Pearson Correlation	,624	,560
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 2	Pearson Correlation	,320*	,288
	Sig. (2-tailed)	,028	,050
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 3	Pearson Correlation	,010	,273
	Sig. (2-tailed)	,947	,063
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 4	Pearson Correlation	,040	,128
	Sig. (2-tailed)	,791	,392
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 5	Pearson Correlation	,233	,418**
	Sig. (2-tailed)	,115	,003
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 6	Pearson Correlation	,395**	,160
	Sig. (2-tailed)	,006	,283
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 7	Pearson Correlation	1	,240
	Sig. (2-tailed)		,104
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 8	Pearson Correlation	,240	1
	Sig. (2-tailed)	,104	
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 9	Pearson Correlation	,156	,066
	Sig. (2-tailed)	,296	,661
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 10	Pearson Correlation	,178	,407**
	Sig. (2-tailed)	,231	,004
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 11	Pearson Correlation	-,080	-,023
	Sig. (2-tailed)	,592	,878
	N	47	47
Total	Pearson Correlation	,522**	,608**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000

		Akuntabilitas Publik 9	Akuntabilitas Publik 10
Akuntabilitas Publik 1	Pearson Correlation	,391	,210
	Sig. (2-tailed)	,007	,156
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 2	Pearson Correlation	,144	,261
	Sig. (2-tailed)	,333	,076
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 3	Pearson Correlation	-,121	,023
	Sig. (2-tailed)	,418	,877
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 4	Pearson Correlation	-,008	-,096
	Sig. (2-tailed)	,959	,521
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 5	Pearson Correlation	,114	,089
	Sig. (2-tailed)	,445	,553
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 6	Pearson Correlation	,140	-,037
	Sig. (2-tailed)	,349	,806
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 7	Pearson Correlation	,156	,178
	Sig. (2-tailed)	,296	,231
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 8	Pearson Correlation	,066	,407**
	Sig. (2-tailed)	,661	,004
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 9	Pearson Correlation	1	,299°
	Sig. (2-tailed)		,041
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 10	Pearson Correlation	,299*	1
	Sig. (2-tailed)	,041	
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 11	Pearson Correlation	,047	-,090
	Sig. (2-tailed)	,755	,546
	N	47	47
Total	Pearson Correlation	,384**	,339
	Sig. (2-tailed)	,008	,020
	N	47	47

		Akuntabilitas Publik 11	Total
Akuntabilitas Publik 1	Pearson Correlation	-,027	,730
Aruntabilitas i ublik i	Sig. (2-tailed)	,856	,000
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 2	Pearson Correlation	-,121	,496
And Itabilitas Tabilit 2	Sig. (2-tailed)	,418	,000
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 3	Pearson Correlation	,195	,339
7 Harriad Hading	Sig. (2-tailed)	,190	,020
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 4	Pearson Correlation	,290	,478
7 maritabilita 7 abilit 7	Sig. (2-tailed)	,048	,001
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 5	Pearson Correlation	,260	,705
r mannas mas r as mrs	Sig. (2-tailed)	,077	,000
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 6	Pearson Correlation	,361*	,635
	Sig. (2-tailed)	,013	,000
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 7	Pearson Correlation	-,080	,522**
Commission of the Commission o	Sig. (2-tailed)	,592	,000
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 8	Pearson Correlation	-,023	,608**
	Sig. (2-tailed)	,878	,000
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 9	Pearson Correlation	,047	,384**
	Sig. (2-tailed)	,755	,008
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 10	Pearson Correlation	-,090	,339*
	Sig. (2-tailed)	,546	,020
	N	47	47
Akuntabilitas Publik 11	Pearson Correlation	1	,394**
	Sig. (2-tailed)		,006
	N	47	47
Total	Pearson Correlation	,394	1
	Sig. (2-tailed)	,006	
	N	47	47

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Variabel Ekonomis (X1)

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items	
,464	5	

Uji Reliabilitas Variabel Efisiensi (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items	
,475	5	

Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items	
,587	6	

Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Publik (Y)

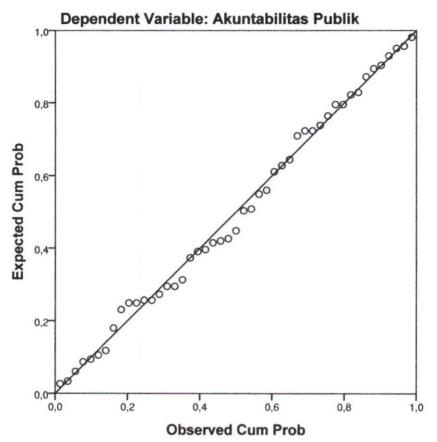
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items	
,723	11	

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



2. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

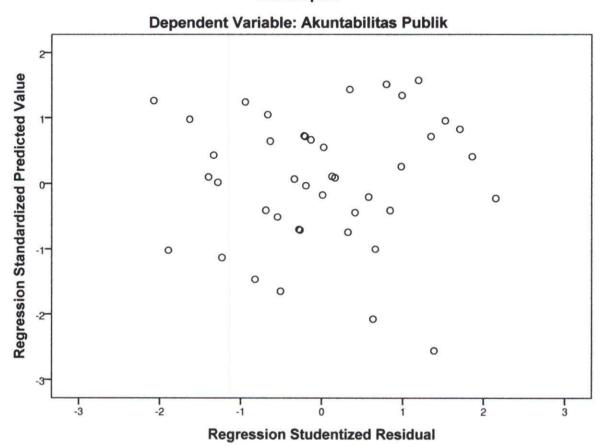
				Standardized Coefficients	
Model		В	Std. Error	Beta	t .
1	(Constant)	,733	,384		1,910
	Ekonomis	,125	,067	,190	2,873
	Efisiensi	,238	,090	,271	2,626
	Efektivitas	,479	,100	,529	4,780

Coefficients^a

			Collinearity Statistics	
Model		Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,029		
	Ekonomis	,005	,761	1,314
	Efisiensi	,003	,731	1,369
	Efektivitas	,000	,637	1,569

3. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Regresi Linier Ganda

Coefficients^a

		Unstandardize	ed Coefficients	Standardized Coefficients	
Model		В	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	,733	,384		1,910
	Ekonomis	,125	,067	,190	2,873
	Efisiensi	,238	,090	,271	2,626
	Efektivitas	,479	,100	,529	4,780

Coefficients^a

			Collinearity	Statistics
Model		Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,029		
	Ekonomis	,005	,761	1,314
	Efisiensi	,003	,731	1,369
	Efektivitas	,000	,637	1,569

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Pengujian Hipotesis

1. Pegujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients^a

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients	
Model		В	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	,733	,384		1,910
	Ekonomis	,125	,067	,190	2,873
	Efisiensi	,238	,090	,271	2,626
	Efektivitas	,479	,100	,529	4,780

Coefficients^a

			Collinearit	y Statistics
Model		Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,029		
	Ekonomis	,005	,761	1,314
	Efisiensi	,003	,731	1,369
	Efektivitas	,000	,637	1,569

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

2. Pegujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	2,811	3	,937	28,427
	Residual	1,417	43	,033	
	Total	4,228	46		

ANOVA^a

Model		Sig.
1	Regression	,000 ^b
	Residual	
	Total	

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik
- b. Predictors: (Constant), Efektivitas, Ekonomis, Efisiensi

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,815 ^a	,665	,641	,18155

a. Predictors: (Constant), Efektivitas, Ekonomis, Efisiensi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Tabel r untuk df = 1 - 50

1	Tir	ngkat signif	ikansi untu	ık uji satu	arah
df = (N-2)	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
ui – (11-2)	Tir	ngkat signif	fikansi untu	ık uji dua a	arah
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.872
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.1800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.760
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.724
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.628
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.554
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.546
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5120
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.500
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3636	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	8.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
	4.4343	0.2133	0.3273	0.3373	0.4473

Teori Pengujian 5%

df = N (Jumlah Sampel - 2 = 47 - 2

= 45

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	
df		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002	
	41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127	
	42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595	
	43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3 29089	
	44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	C 2.41413	2.69228	3.28607	
	45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148	
	46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710	Taraf Signifikan 5%
	47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291	Tarai Sigiiinkan 570
	48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891	
	49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508	
	50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141	
	51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789	
	52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451	db = n - k - 1
	53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127	
	54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815	= 47 - 3 - 1
	55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515	= 43
	56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226	W - 4
	57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948	Keterangan
	58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680	n = Jumlah Sampel
	59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421	k = Jumlah Variabel
	60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171	Independen
	61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930	
	62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696	
	63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471	
	64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253	
	65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041	
	66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837	
	67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639	
	68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446	
	69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260	
	70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079	
	71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903	
	72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733	
	73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567	
	74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406	
	75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249	
	76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096	
	77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948	
	78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804	
	79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663	
	80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526	

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

			-		-			-							
df untuk penyebut							df untuk	pembila	ang (N1)						
(N2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15 16	4.54 4.49	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.85	2.74	2.66	2.59 2.55	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.34	2.28	2.29	2.27
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.74	2.60	2.54	2.45	2.42	2.35	2.34	2.28	2.25	2.20	2.23
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.23	2.22	2.20
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Catatan

Cara Pencarian Sama Seperti Tabel t



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Jalan Merdeka No. 252 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon: (0711) 357279 Faksimile: (0711) 357290 Kode Pos 30131 Website: www.bkdd.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 800/386 /BKD.Diklat-I/2015

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama

: H. Effendi, S.Sos

b. Jabatan

Sekretaris BKD dan Diklat Kota Palembang

dengan ini menerangkan bahwa

a. Nama

: Julius Saputra

b. NIM

: 222011129

c. Mahasiswa

: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

d. Maksud

: Adalah benar Telah selesai mengadakan Penelitian /

Pengambilan Data secara langsung di Badan Kepegawaian

Daerah dan Diklat Kota Palembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, ag Januari 2015

a.n. KEPALA BKD DAN DIKLAT

SEKRETARIS,

H. BHITENDI, S.Sos

NIP. 196303101988031006



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 74 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0711) 353522,367486 Faksimile. Ext 103 Kode pos 30131

E-mail: bappeda_palembang@yahoo.co.id Website: www.bappeda.palembang.go.id

Surat Keterangan

Nomor: 045/0218/Bpp /2015

Kepala Bappeda Kota Palembang, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama

: Julius Saputra

NIM

: 222011199

Pekerjaan

: Mahasiswa

Universitas

Muhammadyah

Palembang

Judul/Topik

: Pengaruh Value For Money Terhadap

Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada

Pemerintahan Daerah Kota Palembang)

Telah melaksanakan Penelitian di Bappeda Kota Palembang untuk keperluan penyelesaian tugas akhir yang bersangkutan.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS BAPPEDA KOTA PALEMBANG

Ir. A. SYAWALI, MM

NFP/196402291993031002



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP

JALAN LUNJUK JAYA NO. 2 TEL. 310154 FAX. 310154 PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor of /KET / 1 / 2015

ang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota alembang:

Nama

: Siti Emma Sumiatul, S.Sos, M.Si

NIP

: 196804021988102001

Pangkat / Gol

: Pembina Tk. I / IV.b

Jabatan

: Sekretaris

Unit Kerja

: Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang

engan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Julius Saputra

NIM

: 222011192

Jurusan/ Fak

: Akuntansi / Ekonomi dan Bisnis

Universitas

: Universitas Muhammadiyah Palembang

elah melakukan pengambilan data quesioner di Badan Lingkungan Hidup ota Palembang pada tanggal 8 Januari 2015.

emikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan perlunya.

Palembang, 6 Januari 2015

a.n. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SERRETARIS,

Siti Erfima Sumiatul, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

BADAN INGKUNGAN HIDU

NIP. 196804021988102001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(BKB - PP)

JALAN MERDEKA NO. 3 TELP. 358272 PALEMBANG 30132 www.bkbpp.palembang.go.id

Palembang, 9 Februari 2015

Kepada

omor

: 070/6/ /BKB-PP/2015

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa

ifat

al

: Biasa

Dan Politik Kota Palembang

ampiran

Di -

: Izin Pengambilan Data/ Penelitian

Palembang

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/010/BAN.KBP/2015 Tanggal 8 Januari 2015 Perihal: Izin Pengambilan Data/

Penelitian atas nama:

Nama: Julius Saputra

NIM : 222011192

Telah selesai mengambil Data di BKB-PP Kota Palembang dari tanggal 8 Januari 2015 Sampai dengan 8 Maret 2015.

Demikian atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

KEPATA BADAN KELUARGA BERENCANA
KEDAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA PALEMBANG

K. SADARUDDIN ,S.SOS,M.SI
REMBINA TK. I /IV.B
19590816198403 1006

mbusan Yth:

- 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palembang
- Mahasiswa ybs.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon: 0711-312011, 113, Fax. 0711-360986 Kode Pos 30131

Palembang, 27 Januari 2015

Kepada,

di -

nor

: 070/ 94 /BPB DAN PK/2015

Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

: Biasa

Universitas Muhamadiyah

npiran

.

: Izin Pengambilan Data/Penelitian

PALEMBANG

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tanggal 08 Januari 2015 No.070/010/BAN.KBP/2015 perihal seperti tersebut di atas, maka bersama ini dipermaklumkan bahwa saudara:

Nama

: Julius Saputra

NPM

: 222011133

Program

: Ekonomi dan Bisnis

Untuk Melaksanakan pengambilan data pada instansi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan segala sesuatu biaya yang timbul akibat penelitian tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

An. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA PALEMBANG

lf. H. Raden Wijaya M Yusuf, MM

Perhbina Tk.I NIP 195808061980031011



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA PALEMBANG

Jalan Ki Kemas Umar No. 84 Kel. 22 Ilir Palembang Telepon: (0711) 364115 Fax: (0711) 364115 Kode Pos 30131 Email: Bkpmd.plg@gmail.com Website: www.bakorpmd.palembang.go.id

Palembang, 10 Pebruari 2015

lomor

ampiran erihal

ifat

.

/BKPMD/2015

Kepada,

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah

di –

Palembang

: Izin Pengambilan Data/Penelitian

Menindak lanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palemabang Nomor : 070/139/BAN.KBP/2015 tanggal 27 Janauri 2015 perihal Izin Pengambilan Data/Penelitian Penelitian atas nama :

No	Nama	Nim	Judul Penelitian
1	Julius Saputra	222011192	Pengaruh Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kota Palembang)

Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk *menerima* melaksanakan Izin Pengambilan Data/Penelitian di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Badan asi Psnanaman Modal Daerah

elembang

ir. RIDWAN, MM
Pembina

£. M96612151995031003

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Alamat: Jl. Demang Lebar Daun No. 3 Telp. 445985, Fax 443548 Palembang 30137

Palembang, 28 Januari 2015

: 800/ 049 /BPMK/2015

: Biasa

an : 1 (satu) lembar

: IzinPengambilan Data / Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palembang

di-

Palembang

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 070/010/BAN.KBP/2015, perihal seperti tersebut di atas, maka bersama ini dipermaklumkan bahwa saudara :

Nama

: Julius Saputra

NPM

222011192

Program

: Ekonomi dan Bisnis

Untuk melaksanakan pengambilan data pada Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang pada prinsipnya kami tidakberkeberatan dan segala sesuatu biaya yang timbul akibat penelitian tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

ota Ralembang

HERI APRIAN, SH

Pembina Tk. I NIP.196504051989031015



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

JL. JEND. BAMBANG UTOYO, 5 ILIR TELP. 718365

E-mail: BARPUSDOK.PLG@GMAIL.COM, Website: www.barpusdok.palembang.go.id

Palembang,

Januari 2015

Kepada

omor

: 070/m /BARPUSDOK

ifat

'eriha!

: Biasa

ampiran: -

: Mohon Bantuan Data

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah

Palembang

di-

Palembang

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Iniversitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 482/H-5/FEB-UMP/I/2015, tanggal 13 anuari 2015 perihal Permohonan Bantuan Data, pada prinsipnya kami tidak erkeberatan menerima Mahasiswi tersebut untuk melaksanakan Penelitian atau engumpulan Data pada Badan Arsip, Perpustakaari dan Dokumentasi Kota alembang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang

milira, SE.,MM

198603 1 003



بسماله للحمز الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

PEMBIMBING

IIM : 22 2011 192 | KETUA : Lis Djuniar, S.E.M.Si

PROGRAM STUDI : Akuntansi | ANGGOTA :

UDUL SKRIPSI : Pengaruh Value For Money (Ekono

Pengaruh Value For Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah

Kota Palembang)

NAME OF THE PERSON OF THE PERS	Sales and the second second second				
10.	TGL/BL/TH	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEI	MBIMBING	KETERANGAN
	KONSULTASI	-	KETUA	ANGGOTA	THE PETO WYON WY
1	20/214	Bab ? 5/d Til	Ju-		Pubaili 1
2	,		1		
3	26/12/14	Bab PS/d. VAAMM	ADO		Acc
4	,	2 Mo.	2/4		
5	5/119	Bull Fri W	-	2	Pebaili!
6		A HATTER		E	
7	10/14	hale N & State		EMB	Pr bailil
8		Z		ANG	,
9	20/14	BUP V SEV	The state of the s	G	Rebaili 1
10		11.2315	A CHILL		` .
11	5/2 19	But Till Will		8	Pekaili!
12		The state of the s	5		,
13	10/2 14	Bab Was	- A		Pabeili /
14		- SEKON	NO.		,
5	28/2 9	But 7 5/2	4.		ACC
6		+ Keseluruhan			

Slerips,

ATATAN:

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Program Siver Rosaluta Chazali, E., Ak.M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI MANAJEMEN (51) PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3) Nomor . 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 Nomor: 044/5K/BAN-PT/Akred/5/1/2014 Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011

(B) (B) Nomor 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

(B)

te: umpalembang.net/feump

Email: feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/ Tanggal

: Selasa/ 24 Maret 2015

Waktu

: 08.00 s/d 12.00 WIB

Nama

: Julius Saputra

NIM

: 222011192

Program Studi

: Akuntansi

Mata Kuliah Pokok

: Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi

: PENGARUH VALUE FOR MONEY (EKONOMIS, EFISIENSI DAN

EFEKTIVITAS) TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi

Kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL TANDA PERSETUJUAN TANGAN
1	Lis Djuniar, S.E, M.Si	Pembimbing	26-3-2015 4700
2	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	27 Mm Var Tou
3	Aprianto, S.E, M.Si	Penguji I	26/88/2015
4	Lis Djuniar, S.E, M.Si	Penguji II	26 - 3 - 2015

Palembang, Maret 2015

An. Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si NIDN/NBM: 0228115802/1021961

ISLAMI & UNGGUL



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



DIBERIKAN KEPADA:

NAMA

: JULIUS SAPUTRA

NIM

: 222011192

JURUSAN : Akuntansi

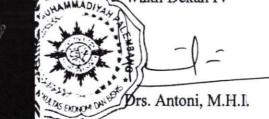
Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan Predikat SANGAT MEMUASKAN

Palembang, 03 Maret 2015

Tongga Céin island

an. Dekan
Wakil Dekan IV







CANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG

SERTIFIKAT

: 3769 / KPPT/2014

Diberikan Kepada:

ama

JULIUS SAPUTRA

M

22 2011 192

irusan/Prog Studi EKONOMI

ebagai Mahasiswa Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota alembang dari tanggal 3 Februari s.d 28 Februari 2014.

Dengan nilai AMAT BAIK

0 Desember 2014

PERIJINAN TERPADU KEPALA KA

P. 196206161993081001





SEMINAR KIAT SUKSES LULUS BETAHUN

"BULATKAN TEKAD MENUJU LULUS 3,5 TAHUN"

PIAGAMPENGHARGAAN

Kepeda

Julius Saputra

Sebagai

第三年日3月1

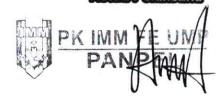
\$ Ekonomi UMP

autin Syamsuddin, S.E. AkMSi

Refua Umum

Muhamad Yamin

Ketua Pelaksana



Gumar Heru Diansyah

ikatan anjintan indonesia ikatan akuntan indonesia ika**Daberi Kan**ik**Kepada**nesia inesia ikatan aka manunginesi katan akuntan indonesia Sebagai Peserta DONESIA IKATAN AKUNTAN INDUNESIA IKATAN AKUNTAN INDONESIA IKATAN INDONESIA IKATAN AKUNTAN INDONESIA IKATAN INDONESIA INDO (Pada Tanggal 31 Januari 2015 di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumsel dengan nilai 4 SKP) nakuntan Indonesia Ikatan akuntan Indonesia **Palembang, 31 Januari 2015** Jakuntan Indonesia Ikatan akuntan Indonesia ALE INDONESIA IKATAN AKUNTAN INDONES Yakub, CA Instruktur Ketua IAI Wil. Sumsel KUNTAN INDONESIA IKATAN AKUNTAN INDONESIA. IKATAN AKUNTAN INDONESIA IKATAN AKUNTAN INDONESIA IKATAN AKUNTAN POONA AKAAN AKUNTAN INDONESIA. IKATAN AKUNTAN INDONESIA IKATAN AKUNTAN POONA AKAAN AKUNTAN POONA AKAAN AKUNTAN INDONESIA. IKATAN AKUNTAN INDONESIA IKATAN INDONESIA. IKATAN AKUNTAN INDONESIA IKATAN AKUNTAN INDONESIA. IKATAN AKUNTAN INDONESIA.

BIODATA

Nama

: Julius Saputra

Nim

: 222011192

Tempat/Tanggal Lahir

: Pagaralam/27-Juni-1993

Agama

: Islam

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Alamat Koszan

: Jalan. Jendral Ahmad. Yani 13 Ulu Palembang, Jln

Silaberanti Gang Satria 02. No: 30. RT 035. RW 003.

Kelurahan Silaberanti. Kecamatan Seberang Ulu I

(Bedeng Haji. Zainuri) Kode Pos: 30252

Nama Bapak

: Alm. Arisman (14 Februari 2015)

Nama Ibu

: Kuswati

Pekerjaan Bapak

: -

Pekerjaan Ibu

: Ibu Rumah Tangga

E-mail

: cooljulius@rocketmail.com/iyus2737@gmail.com

No Handphone

: 0853-6938-5599

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. SD Muhammadiyah 1 Kota Pagaralam, Tahun 1999-2005
- 2. SMP Negeri 1 Kota Pagaralam, Tahun 2005-2008
- 3. SMA Negeri 1 Kota Pagaralam, Tahun 2008-2011
- Universitas Muhammadiyah Kota Palembang Jurusan Akuntansi Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2011-2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI



LABORATORIUM KOMPUTER

SERTIFIKAT

Nomor:

010 / G-15 / LAB.. FE UMP / IV / 2013

Diberikan Kepada :

Nama

: JULIUS SAPUTRA

Nim

: 222011192

Tempat Lahir

: PAGAR ALAM

Tanggal Lahir

: 27 JUNI 1993

Nilai

85

A SANGAT MEMUASKAN

Peserta Pelatihan Komputer Akuntansi: MICROSOFT FOR ACCOUNTING / GENERAL LEDGER yang dilaksanakan dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang April 2013

Dekan

.M. Tauriq Syamsuddin., S.E., Ak., MSi





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LABORATORIUM BAHASA

Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name

: Julius Saputra

Place/Date of Birth

: Pagaralam, June 26th, 1993

Test Times Taken

: +1

Test Date

: February 17th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension

48

Structure Grammar

20

Reading Comprehension

18

OVERALL SCORE

: 446

Palembang, March 5th, 2015

Rini Susanti, S.Pd.,M.A

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

123 CEPTITICATES



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI





SERTIFIKAT

Nomor:

0344/ G-15 / LAB.. FE UMP / VIII / 2012

Diberikan Kepada:

Nama

: JULIUS SAPUTRA

Nim

: 222011192

Tempat Lahir

: PAGAR ALAM

Tanggal Lahir

: 27 JUNI 1993

Nilai

85,8

100

SANGAT MEMUASKAN

Peserta Pelatihan Komputer Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dilaksanakan dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang Agustus 2012

Dekar

M. Tadfig Syamsuddin., S.E., Ak., MSP